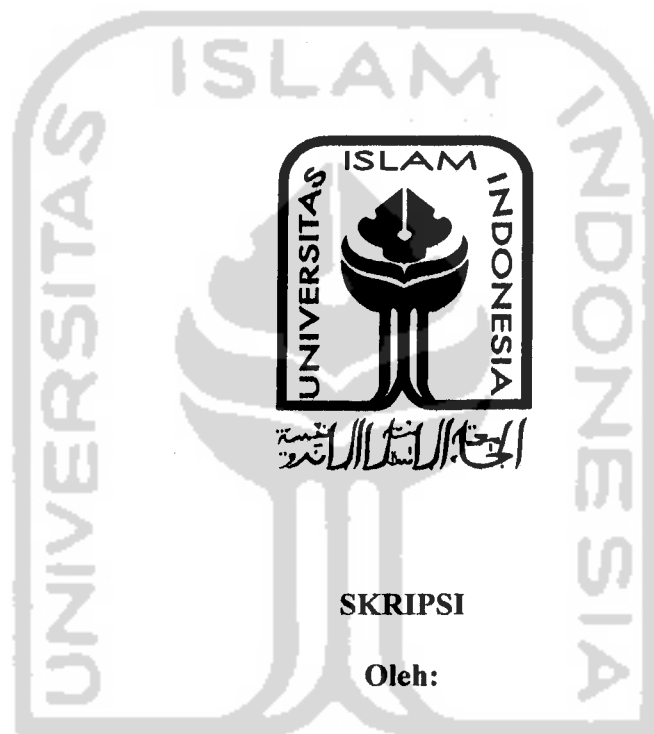


**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN VARIABEL
MODERATOR PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK**



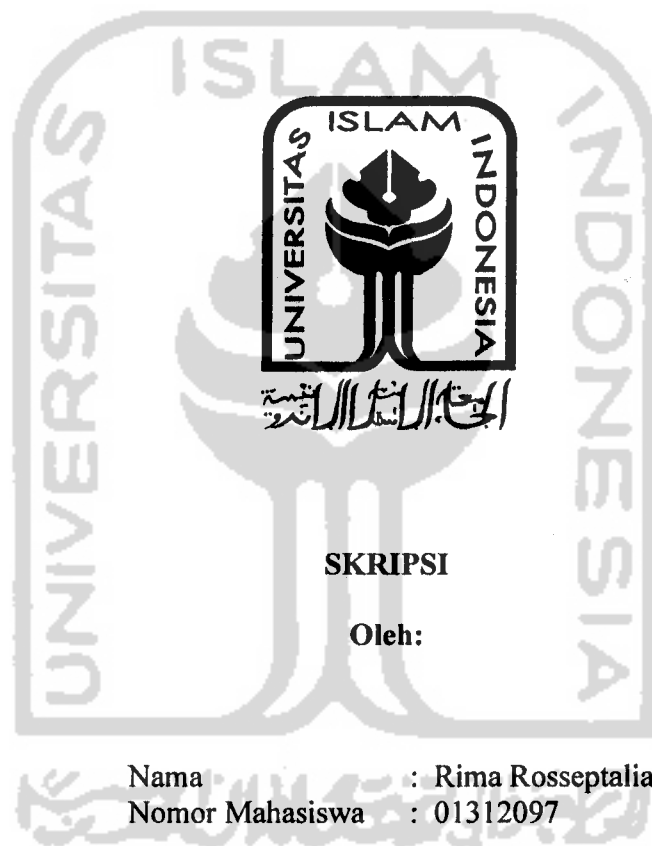
SKRIPSI

Oleh:

Nama : Rima Rosseptalia
No. Mahasiswa : 01312097

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006**

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN VARIABEL
MODERATOR PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK**



Nama : Rima Rosseptalia
Nomor Mahasiswa : 01312097

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2006

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN VARIABEL
MODERATOR PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Rima Rosseptalia
No. Mahasiswa : 01312097

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."



Yogyakarta, Mei 2006

Penyusun,

(Rima Rosseptalia)

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN VARIABEL
MODERATOR PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK**



Nama : RimaRosseptalia
Nomor Mahasiswa : 01 312 097
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 8 Mei 2006

Dosen Pembimbing

(Drs. Johan Arifin, M.Si)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap
Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi
Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik**

Disusun Oleh: RIMA ROSSEPTALIA
Nomor mahasiswa: 01312097

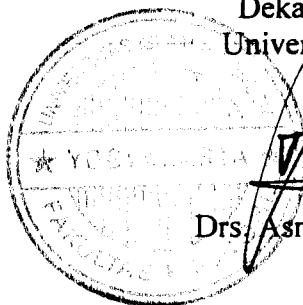
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 15 Juni 2006

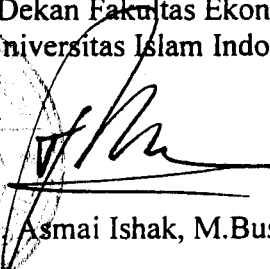
Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Johan Arifin, M.Si

Penguji : Dra. Erna Hidayah, M.Si, Ak



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia




Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah...Seiring Rasa Syukur dan Kerendahan Hati Karya Ini
Kupersembahkan Untuk Orang-orang yang Paling Kucintai
& Kusayangi*

- ❖ Eyangku Tercinta yang telah mencurahkan doanya untukku dan keluargaku walaupun Engkau telah jauh disana*
- ❖ Mama dan papa yang tak pernah berhenti mendoakanku dalam setiap langkahku*
- ❖ Kakakku tercinta "Rixo" atas kasih sayangmu*
- ❖ Seluruh keluarga besarku buat semua perhatian dan doanya*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini.

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik” ini disusun guna melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana (S1) Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Kepada semua pihak yang memberikan bantuan moril dan materiil baik secara langsung maupun tidak langsung hingga tersusun skripsi ini, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya.
2. Drs. Johan Arifin, M.Si selaku pembimbing skripsi yang penuh keikhlasan dan kesabaran telah membimbing penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak Dr .Asmai Ishak ,M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi UII

4. Ibu Dra .Erna Hidayah, Msi., Ak. selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UII
5. Seluruh staf pengajar dan karyawan dilingkungan Fakultas Ekonomi UII
6. DPRD Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan dan mengijinkan peneliti untuk melakukan penelitian
7. Eyangku tercinta, *“doamu adalah segalanya....semoga kau damai disisiNya”*
8. Mamaku Hj. Tariana dan papaku H. Drs. Sulaiman Hasan yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan cintanya, *“terima kasih atas kesabarannya,tidak ada kata yang bisa terucap selain rasa syukurku memiliki orang tua seperti kalian... Dan ini sedikit kado kecil yang baru bisa aku berikan”*
9. Kakakku Tercinta Rixo Hari Akbar *“Kau adalah kebanggaanku”* Jika ada orang paling bahagia di dunia ini adalah AKU, yang diberikan keluarga yang sangat menyayangiku,terimakasih kakakku.....LOVE U
10. Om ku tersayang “Pak Omboh” beserta keluarga atas segala dukungannya..
11. Bapak H. Muhajir M Ardian, BSc. beserta keluarga atas segala arahan bantuan dan doanya.
12. Kekasihku Ajie Fajar Islam Ardian yang telah memberikan semangat, kasih sayang dan cintanya kepada penulis. *“Terima kasih atas hari-hari indah kita selama ini,cepatan nyusul yach... CAYO!!!!”*
13. Mbak Diah *“makasih buat dukungannya,sarjana bok!!he.he”*, Mas Ompong *buat motifasinya ayo cepet nyusul..*

14. Sahabat-sahabatku : Nov@ "ayo jek kejar!!!!" NYaHni and Putri "thanks for motifation and your love",Ulpe "akhire wisuda juga pe" , TE2H "makasih buat bimbingannya", Miss KD" kapan nikah nech??, Tina "welcome to UGM..he.he.",Niken..Nira Tika, Vena "piye kabare mbak??"

15. Mas Him "makasih buat kesabarannya selama ini", Mas Mul, Dek PiPit "thanks buat bantuannya",temen2 seperjuanganku "keep smile...OK!!"

16. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

Akhirnya penulis berharap,semoga karya ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, Mei 2006

Penulis

Rima Rosseptalia

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| Halaman Sampul Depan Skripsi | i |
| Halaman Judul Skripsi | ii |
| Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme | iii |
| Halaman Pengesahan Skripsi | iv |
| Halaman Pengesahan Ujian Skripsi | v |
| Halaman Persembahan | vi |
| Kata Pengantar | vii |
| Daftar Isi | x |
| Daftar Tabel | xiii |
| Daftar Gambar | xiv |
| Daftar Lampiran | xv |
| Abstrak | xvi |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 4 |
| 1.5 Sistematika Isi | 5 |

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| 2.1. Konsep Anggaran Sektor Publik..... | 7 |
| 2.2. Pengawasan Keuangan Daerah oleh DPRD..... | 15 |
| 2.3. Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran..... | 17 |
| 2.4. Transparansi Kebijakan Publik..... | 18 |
| 2.5. Pengembangan hipotesis..... | 19 |

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| 3.1. Populasi dan sampel..... | 24 |
| 3.2. Metode Pengumpulan Data..... | 25 |
| 3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel..... | 26 |
| 3.4. Uji Validitas dan Reliabilitas..... | 29 |
| 3.5. Metode Analisis Data..... | 30 |
| 3.6. Identitas Responden..... | 34 |

BAB IV ANALISIS DATA

| | |
|--|----|
| 4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Kueisoner..... | 37 |
| 4.2. Deskripsi Variabel Penelitian..... | 41 |
| 4.3. Uji Asumsi Klasik..... | 47 |
| 4.4. Anslisi Regresi..... | 49 |
| 4.5. Pengujian Hipotesis..... | 51 |

BAB V KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan.....55

5.2. .Saran.....57

5.3. Keterbatasan57

DAFTAR PUSTAKA.....57



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| 3.1 Jenis Kelamin Responden..... | 34 |
| 3.2 Pendidikan Tertinggi Responden..... | 35 |
| 3.3 Usia Responden..... | 36 |
| 4.1 Hasil Uji Validitas..... | 38 |
| 4.2 Hasil Uji Reliabilitas..... | 41 |
| 4.3 Deskripsi Variabel Penelitian..... | 42 |
| 4.4 Distribusi Variabel Pengawasan Keuangan Daerah..... | 43 |
| 4.5 Distribusi Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran..... | 44 |
| 4.6 Distribusi Variabel Partisipasi Masyarakat..... | 45 |
| 4.7. Distribusi Variabel Transparansi Kebijakan Publik..... | 46 |
| 4.8 . Uji Heterskedastisitas..... | 48 |
| 4.9 Uji Multokolinearitas..... | 49 |
| 4.10 .Hasil Analisis Regresi Linear Berganda..... | 50 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 2.1 Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik..... | 32 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|--|---------|
| I. Kuesioner | 62 |
| II. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner | 65 |
| III. Distribusi Skor Jawaban Responden | 83 |
| IV. Analisis Regresi | 96 |



ABSTRAK

Penelitian ini meneliti pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variable moderator partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Pengertian pengawasan keuangan daerah adalah tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar penerimaan daerah dan pengeluaran daerah tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran.

Dalam penelitian ini mengambil sample anggota komisi “c” dan anggota panitia anggaran DPRD Propinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan kuosioner yang kemudian dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, kedua interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, dan ketiga interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Kata kunci : Pengawasan keuangan daerah (APBD), pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah yang digulirkan dalam era reformasi dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP). Pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia.

Dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada prinsipnya, mengatur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dengan adanya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 terjadi perubahan yang signifikan mengenai hubungan legislatif dan eksekutif di daerah karena kedua lembaga tersebut memiliki kekuatan yang

sama dan bersifat sejajar menjadi mitra. Dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa di daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya.

Implikasi positif dari berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif didalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat , yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik didaerah bersama-sama Kepala Daerah (Bupati dan Walikota).

Dampak lain yang muncul dengan adanya otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan *good governance* sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Sehubungan dengan hal itu maka peran dewan menjadi sangat meningkat dalam mengontrol kebijakan pemerintahan. Menurut PP Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal didaerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Lembaga legislative mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini fungsi dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan anggaran.

Permasalahannya adalah apakah dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih disebabkan pengetahuan dewan tentang anggaran ataukah disebabkan masalah lain. Disamping itu apakah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik juga akan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan dewan.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Pramono, 2002). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan kebijakan publik.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah yang telah disampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh pada pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?
3. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh pada pengaruh

pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasar perumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat pada pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik pada pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada para akademisi untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terutama dalam pengembangan sistem manajemen di sektor publik, dan dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya.

Bagi pemerintah daerah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam melaksanakan otonomi daerah, khususnya dalam peningkatan kinerja DPRD yang berkaitan dengan pengawasan anggaran (APBD) untuk mewujudkan

good government (pemerintahan yang baik), dan dapat dijadikan acuan bagi partai politik dalam merekrut anggota dewan serta pengembangan kader partai.

1.5. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penelitian ini akan dituangkan dalam 5 bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu serta formulasi hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan berbagai hal, diantaranya : sampel penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, metode penelitian, model penelitian dan pengujian hipotesis.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian dan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil yang didapat dalam penelitian berupa keseluruhan atau sebagian, baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan harapan umum maupun peneliti. Dalam bab ini juga dipaparkan alasan kesesuaian dan ketidaksesuaian hasil penelitian. Selain itu dalam bab ini,

dijelaskan dan dibandingkan pula hasil yang diperoleh dari penelitian yang sebelumnya.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga akan diperoleh kesimpulan akhir dari penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya serta implikasi penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Konsep Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif, biasanya dalam unit moneter (Halim *et al.*, 2000). Sementara Mardiasmo (2002) memberikan definisi mengenai anggaran, bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran atau proses penyusunan anggaran adalah proses pengoperasioanal rencana dalam bentuk pengkuatifikasian, biasanya dalam bentuk unit moneter, untuk kurun waktu tertentu (Halim *et al.*, 2000), jadi penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2003), proses penyusunan anggaran pada dasarnya memiliki 4 tujuan utama yaitu: (1) menyelaraskan dengan rencana strategik, (2) untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian dalam organisasi, (3) untuk memberikan tanggungjawab kepada manajer atau pimpinan, guna mengotorisasi jumlah dana yang dapat digunakan, dan untuk memberitahukan hasil yang mereka capai, serta (4) untuk mencapai kerjasama.

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung aspek yang bersifat politis sehingga proses penganggaran dalam organisasi sektor publik dapat dikategorikan sebagai proses politik bukan hanya proses ekonomi. Hal ini sangat berbeda dengan penganggaran pada

perusahaan swasta yang relatif kecil bahkan mungkin tidak mengandung aspek politis. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2002).

Penyusunan anggaran di dalam institusi publik berkaitan dengan proses penentuan alokasi jumlah dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas pemerintah dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan implementasi hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat dan ditetapkan. Proses penyusunan anggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan atau strategi yang sudah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo, 2002). Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi: aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik.

Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (*oversight body*) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran.

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan: (1) Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja); dan (2) Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Tidak semua aspek kehidupan masyarakat tercakup oleh anggaran sektor publik. Terdapat beberapa aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh anggaran sektor publik, baik skala nasional maupun lokal. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Anggaran merupakan *blue print* keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang.

2.1.1. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Dalam arti luas, anggaran daerah atau anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai: (1) instrumen politik, (2) instrumen kebijakan fiskal, (3) instrumen perencanaan, dan (5) instrumen pengendalian (Halim, 2001). Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1) sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, dan (8) alat menciptakan ruang publik.

2.1.2. Norma Umum Anggaran Sektor Publik

Agar strategi yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka pemerintah daerah perlu untuk tetap memiliki komitmen bahwa anggaran daerah adalah perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif, dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran sektor publik atau anggaran daerah harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut (Halim, 2001);

1. Keadilan anggaran
2. Efisiensi dan efektivitas anggaran
3. Anggaran berimbang dan defisit
4. Disiplin anggaran
5. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

2.1.3. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo (2002) tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyusunan anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Penyusunan Anggaran (*Budget Preparation*)

Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah

yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor "*uncertainty*" (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada teknik dan sistem anggaran yang digunakan.

2. Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap berikutnya adalah *budget ratification*. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif (kepala daerah) dituntut tidak hanya memiliki "*managerial skill*" namun juga harus mempunyai "*political skill*," "*salesmanship*," dan "*coalition building*" yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementation*)

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung pengendalian anggaran.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak masalah.

5. Ruang Lingkup, Peran, dan Fungsi DPRD

Sesuai dengan paradigma baru yang berkembang saat ini, DPRD mempunyai posisi, tugas, dan fungsi yang strategis dan penting dalam

perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Fungsi pengawasan dan perencanaan hendaknya sudah dilakukan DPRD sejak proses penjaringan aspirasi masyarakat hingga penetapan arah dan Kebijakan Umum APBD serta penentuan Strategi dan Prioritas APBD. Sementara itu, fungsi pengawasan hendaknya dilakukan oleh DPRD pada saat perencanaan APBD, pelaksanaan APBD, dan pelaporan APBD.

2.1.4. Evaluasi Sistem Penganggaran

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 disebutkan bahwa APBD harus secara riil mencerminkan niat pemerintah daerah untuk mengantisipasi upaya pemulihan ekonomi daerah dan memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam pengalokasian dan pengelolaan anggaran daerah secara efisien dan efektif. Strategi umum yang harus dilakukan dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

1. Meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja,
2. Melakukan penghematan yang diikuti dengan peningkatan disiplin anggaran, dan
3. Pengetatan serta perbaikan mekanisme pelaksanaan anggaran yang terhindar dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut akan dapat tercapai, salah satunya apabila manajemen keuangan daerah (anggaran) dilaksanakan dengan baik.

Elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi:

- a) Akuntabilitas Keuangan Daerah;
- b) *Value for Money*;
- c) Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*);
- d) Transparansi, dan
- e) Pengendalian.

Pengawasan DPRD dan masyarakat harus sudah dilakukan sejak tahap persiapan dan penyusunan APBD. Dalam tahap ratifikasi anggaran, peran DPRD hendaknya tidak lagi sebagai tukang stempel saja, namun harus benar-benar memainkan fungsinya sebagai pemegang hak budget. Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran harus diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan.

2.2. Pengawasan Keuangan Daerah oleh DPRD

Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini untuk memantau apakah pelaksanaan anggaran tersebut telah berjalan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan, serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis. Proses pengawasan di sini diartikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Keppres No. 74 Tahun 2001).

Selain itu untuk mendukung akuntabilitas pemerintah daerah di samping diperlukan pengawasan yang bersifat internal juga diperlukan pengawasan yang bersifat eksternal yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi pengawasan secara internal selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK, BPKP, serta DPR dan DPRD, sehingga akan diperoleh suatu laporan pelaksanaan pemerintahan yang diperoleh berdasarkan prosedur *chek and balances*. Dalam penelitian ini, proses pengawasan akan difokuskan pada pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, DPRD memiliki bagian khusus yang disebut Panitia Anggaran.

Pengawasan yang dilakukan DPRD atau Dewan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan yang bersifat langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan minta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui *post audit* melalui pemeriksaan di tempat (Sopannah dan Mardiasmo, 2003).

2.3. Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran

Secara umum pengertian partisipasi adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagi pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan (Wagner, 1994 dalam Zainuddin *et al.*, 2002). Oleh karena itu, partisipasi di dalam penyusunan anggaran merupakan variabel penting yang akan meningkatkan kualitas anggaran yang tersusun, serta dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan (Hopwood, 1994 dalam Zainuddin *et al.*, 2002). Partisipasi dalam penyusunan anggaran tersebut juga meningkatkan kinerja, sikap dan kepuasan kerja terhadap anggaran. Partisipasi dan pengaruh individual di dalam proses penganggaran merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manajer di dalam pencapaian tujuan penganggaran.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2003) partisipasi di dalam penyusunan anggaran mempunyai efek yang positif, dengan alasan:

1. Ada penerimaan yang lebih besar dari tujuan anggaran jika mereka merasa berada dalam pengendalian manajer, dibandingkan dengan adanya paksaan dari luar. Hal ini menuju kepada tanggung jawab individu untuk mencapai tujuan.
2. Hasil partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah pertukaran informasi yang efektif. Besarnya anggaran yang telah disetujui merupakan hasil kesepakatan antara ahli dan pembuat anggaran atau penyusun anggaran.

2.4. Tranparansi Kebijakan Publik

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk Informasi Keuangan Daerah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (UU No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah). Sistem Informasi Keuangan Daerah tersebut dimaksudkan sebagai serangkaian proses dan prosedur yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah.

Mengacu pada apa yang di sampaikan dalam UU No. 56 Tahun 2005 tersebut, tampak bahwa transparansi kebijakan khususnya kebijakan dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah merupakan variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran, dalam rangka menuju pemerintahan yang baik.

2.5. Pengembangan Hipotesis

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan dengan efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal 1 (6) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta *preventif* dan *represif*. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksanaan. Pengawasan *preventif* dilakukan melalui *pre-audit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *represif*

dilakukan melalui *post audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi).

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan posisi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bargaining position dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya.

Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi, 2001, Sutamoto, 2002). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang.

Yudono (2002) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Sehingga dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

Ha₁ : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996). Achmadi dkk. (2002) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif.

Peran dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Dengan demikian, keterlibatan atau partisipasi masyarakat tersebut diharapkan akan dapat

meningkatkan pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan proposisi ini maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

Ha₂ : Partisipasi masyarakat mempengaruhi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Selain adanya partisipasi masyarakat dalam siklus anggaran transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Dengan demikian, adanya transparansi kebijakan publik tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan proposisi ini maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

Ha₃ : Transparansi kebijakan publik mempengaruhi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah, dengan jumlah 118 orang yang terdiri dari 5 komisi dan anggota panitia anggaran. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut adalah anggota dewan yang membidangi pengawasan keuangan daerah, sehingga sampel yang relevan dengan pertimbangan tersebut adalah anggota dewan komisi "C" dan anggota panitia anggaran di DPRD Propinsi Jawa Tengah.

Masing-masing kelompok responden yang mengembalikan kuisisioner yang telah diisi akan dijadikan sampel penelitian. Untuk itu, kuisisioner-kuisisioner dari responden akan diseleksi terlebih dahulu agar mendapatkan kuisisioner yang terisi secara lengkap sebagaimana yang dikehendaki peneliti untuk kepentingan analisis. Dari hasil pengumpulan data dari 42 kuisisioner yang dikirim, dan jawaban kuisisioner yang digunakan sebagai data sebanyak 27 jawaban kuisisioner.

Rincian jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuisisioner

| | |
|--|-------------|
| Kuisisioner yang dikirim | 42 |
| Kuisisioner yang tidak kembali | <u>15</u> - |
| Kuisisioner yang kembali | 27 |
| Kuisisioner yang tidak lengkap | 0 - |
| Kuisisioner yang digunakan | 27 |
| Tingkat pengembalian (<i>Respon Rate</i>) $27/42 \times 100\%$ | 64% |

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data primer dari responden dilakukan dengan survei, yaitu dengan cara mengumpulkan data pokok (data primer) dari suatu sampel dengan menggunakan instrumen kuisisioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Operasional penyebaran kuisisioner ini dilakukan dengan cara mendatangi dan membagi kuisisioner secara langsung ke kantor DPRD Propinsi Jawa Tengah. Setiap paket kuisisioner terdiri dari dua bagian yang harus dijawab oleh responden dengan mengikuti perintah yang terdapat didalam setiap bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan yang berhubungan dengan data demografi responden yang meliputi jenis kelamin, pendidikan dan jabatan. Bagian kedua adalah pernyataan yang berhubungan dengan pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan daerah.

Mengingat kesibukan-kesibukan para anggota dewan dan sifat pernyataan dalam kuisisioner yang membutuhkan pemikiran dalam menjawabnya, peneliti memberikan tenggang waktu kepada responden untuk menjawab yaitu dari tanggal 25 Januari 2006 sampai dengan tanggal 15 februari 2006, peneliti akan mengambil jawaban dari responden secara langsung.

Data-data dalam penelitian ini harus diuji secara verifikatif oleh sebab itu jawaban deskriptif yang didapat oleh responden perlu diverifikatifkan terlebih dahulu dengan menggunakan skala likert. Skala likert adalah salah satu cara untuk menentukan skor dengan memberikan pertanyaan kepada responden dan memilih salah satu jawaban yang ada.

Interval skor yang digunakan dalam skala Likert penelitian ini adalah:

- a. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1
- b. Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2
- c. Jawaban Tidak Tahu diberi skor 3
- d. Jawaban Setuju diberi skor 4
- e. Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini terdiri dari 4 variabel meliputi: (a) variabel independen: pengetahuan dewan tentang anggaran (b) variabel dependen: pengawasan keuangan daerah (c) variabel moderating: partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

1. Pengetahuan Anggaran

Pengetahuan adalah persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/ APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Pengetahuan Anggaran ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan terhadap penyusunan APBD.
- 2) Pengetahuan terhadap pelaksanaan APBD.
- 3) Pengetahuan untuk mendeteksi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD.
- 4) Pengetahuan untuk mendeteksi terjadinya pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan APBD.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktifitas proses penganggaran yang dilakukan oleh dewan pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Partisipasi Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelibatan masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.
- 2) Masukan dan kritik dari masyarakat terhadap prioritas dan rencana APBD.
- 3) Pelibatan masyarakat dalam penyusunan APBD.
- 4) Pelibatan masyarakat dalam advokasi APBD.
- 5) Pelibatan masyarakat dalam konsultasi dan konfirmasi antara dewan dan pemerintah daerah berkaitan dengan rancangan APBD.
- 6) Kritik dan saran masyarakat sebagai salah satu masukan dalam melakukan revisi APBD.
- 7) Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD.

3. Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi Kebijakan Publik adalah keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan

tertentu. Indikator-indaktor yang digunakan untuk mengukur variabel Transparasi Kebijakan Publik ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pengumuman atau pemberian informasi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun.
- 2) Kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui publik.
- 3) Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.
- 4) Kemampuan transparasi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasi usulan masyarakat.
- 5) Adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik.

4. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan Keuangan Daerah adalah pengawasan yang dilakukan oleh dewan yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (APBD). Indikator-indaktor yang digunakan untuk mengukur variabel Transparasi Kebijakan Publik ini adalah sebagai berikut :

- 1) Keterlibatan Dewan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.
- 2) Pelaksanaan analisis politik terhadap proses penyusunan APBD.
- 3) Keterlibatan Dewan dalam pengesahan APBD.
- 4) Kemampuan menjelaskan APBD yang telah disusun.
- 5) Keyakinan Dewan bahwa APBD telah memiliki transparasi.

- 6) Keterlibatan Dewan dalam memantau pelaksanaan APBD.
- 7) Evaluasi yang dilakukan Dewan terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
- 8) Evaluasi yang dilakukan Dewan terhadap faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD.
- 9). Permintaan keterangan oleh Dewan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota.
- 10).Tindak lanjut dari Dewan jika terjadi kejanggalan dalam LPJ APBD.

3.4. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas seringkali dikonsepsikan sebagai sejauhmana instrumen mampu mengukur atribut yang seharusnya diukur (Azwar, 2001: 51). Jadi melalui uji validitas dapat diketahui sejauh mana instrumen mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya. Validitas yang diuji dalam penelitian ini adalah validitas konstruk, yaitu validitas yang menunjukkan sejauhmana instrumen mampu mengungkap konstruk teoritik yang hendak diukuranya (Azwar, 2001). Salah satu metode yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah analisis faktor (Suryabrata, 2000).

Dalam metode analisis faktor tersebut, validitas diukur dari besarnya *factor loading*. Factor loading menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel dan faktor (Hair, *et al.*, 1998). Dengan demikian untuk menguji signifikansi validitas dilakukan seperti pengujian signifikansi *factor loading*. Menurut Hair *et*

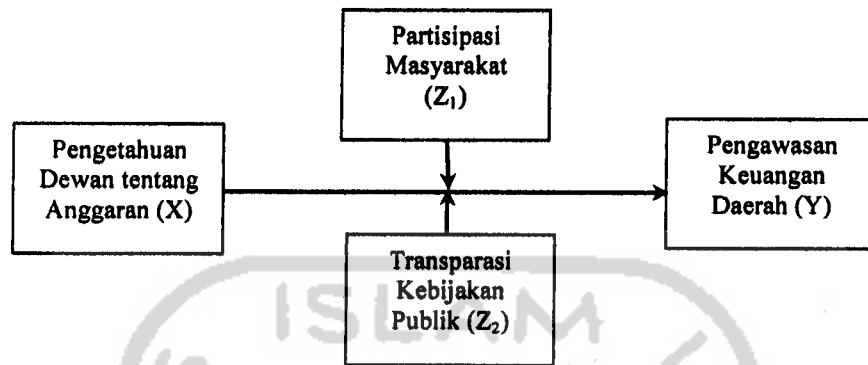
al. (1998), jika *factor loading* ≥ 0.50 maka dianggap secara praktis signifikan. Oleh karena itu, jika suatu item pertanyaan mempunyai *loading* ≥ 0.50 maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Sebelum digunakan dalam penelitian untuk mengambil data, terlebih dahulu kuesioner akan diuji reliabilitas. Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi suatu alat ukur (Sekaran, 1992). Sebagai *rule of thumb* yang digunakan dalam pengujian reliabilitas ini adalah, suatu kuesioner dikatakan reliabel jika memiliki koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach > 0.7 (Hair, 1998).

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) (Sharma, *et al.*, 1981). Secara skematis kedudukan variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.5. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik

Variabel Z_1 dan Z_2 sebagai variabel moderator (*moderating variable*). Variabel moderator merupakan variabel yang mampu mempengaruhi (menguatkan atau melemahkan) pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), tetapi variabel moderator tersebut tidak berkorelasi dengan variabel independen maupun variabel dependen (Sharma, *et al.*).

Mengacu pada model MRA dasar yang dikembangkan oleh Sharma, *et al.* (1981), maka model MRA yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a_0 + b_1X + b_2Z_1 + b_3Z_2 + b_4Z_1X + b_5Z_2X + e$$

Keterangan:

| | |
|---------------------------------|--|
| Y | : Pengawasan Keuangan Daerah |
| X | : Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran |
| Z ₁ | : Partisipasi Masyarakat. |
| Z ₂ | : Transparasi Kebijakan Publik |
| Z ₁ X | : Interaksi antara Z ₁ dengan X |
| Z ₂ X | : Interaksi antara Z ₂ dengan X |
| Z ₁ Z ₂ X | : Interaksi antara Z ₁ , Z ₂ , dan X |
| b | : Koefisien regresi |
| e | : Error |

Sebelum hasil analisis regresi tersebut digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu hasil analisis regresi tersebut dikenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut merupakan asumsi yang mendasari suatu analisis regresi. Uji asumsi klasik meliputi uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

1. Pengujian Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara data urut waktu (*time series*) atau antara space untuk data *cross section*. Keberadaan autokorelasi yang signifikan mengakibatkan parameter regresi menjadi tidak konsisten, meskipun tak biasa. Oleh karena itu, hasil regresi tidak boleh mengandung gejala autokorelasi yang signifikan.

Pengujian terhadap adanya fenomena autokorelasi dalam data yang dianalisis dapat dilakukan dengan menggunakan *Durbin-Watson Test*. Jika nilai statistik Durbin-Watson (DW) mendekati 2, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi yang signifikan Gujarati (2003).

2. Pengujian Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah fenomena di mana pada nilai variabel independen tertentu, masing-masing kesalahan (e_i) mempunyai nilai varian (σ^2) yang tidak sama. Heteroskedastisitas ini mengakibatkan nilai-nilai estimator (koefisien regresi) dari model tersebut tidak efisien meskipun estimator tersebut tidak bias dan konsisten. Pengujian terhadap adanya fenomena heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan *Spearman's Rank Correlation Test*.

3. Pengujian Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna antara satu variabel bebas dengan variabel bebas yang lain. Konsekuensi praktis yang timbul sebagai akibat adanya multikolinearitas ini adalah kesalahan standar parameter menjadi semakin besar. Hal ini boleh terjadi pada hasil analisis regresi. Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan metode VIF (*Variance Inflation Factor*). Adapun kriteria yang digunakan dalam pengujian metode VIF ini adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003);

Jika $VIF_j > 10$ terjadi multikolinearitas tinggi antara regresor (variabel bebas) j dengan regresor (variabel bebas) yang lain.

3.6. Identitas Responden

3.6.1. Jenis Kelamin

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari jenis kelaminnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut;

Tabel 3.1.
Jenis Kelamin Responden

| Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|---------------|----------------|----------------|
| Wanita | 7 | 25.93 |
| Pria | 20 | 74.07 |
| Jumlah | | 100.00 |

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa dari 27 orang responden, 7 orang (25.93%) di antaranya adalah responden wanita, sedangkan 20 orang (74.07%) lainnya adalah responden pria. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, komposisi responden penelitian ini sebagian besar didominasi oleh responden pria.

3.6.2. Pendidikan Tertinggi

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari pendidikan tertingginya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2.
Pendidikan Tertinggi Responden

| Pendidikan Tertinggi | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|----------------------|----------------|----------------|
| SLTA | 8 | 29.63 |
| Akademin/D3 | 3 | 11.11 |
| S1 | 11 | 40.74 |
| S2 | 5 | 18.52 |
| S3 | 0 | 0.00 |
| Jumlah | 27 | 100.00 |

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas tampak bahwa dari 27 orang responden 8 orang (29.63%) di antaranya memiliki pendidikan tertinggi SLTA, 3 orang (11.11%) memiliki pendidikan tertinggi Akademi/D3, 11 orang (40.74%) memiliki pendidikan tertinggi S1, dan 5 orang (18.52%) memiliki pendidikan tertinggi S2.

Mengacu pada distribusi pendidikan tertinggi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki pendidikan tertinggi S1 dan SLTA.

3.6.3. Usia

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari usianya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3.
Usia Responden

| Usia Responden | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|----------------|----------------|----------------|
| 21 - 35 tahun | 4 | 14.81 |
| 36 - 45 tahun | 13 | 48.15 |
| > 46 tahun | 10 | 37.04 |
| Jumlah | 27 | 100.00 |

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan distribusi usia responden yang disajikan dalam Tabel 3.3 di atas tampak bahwa, dari 27 orang responden 4 orang (14.81%) di antaranya berusia antara 21-35 tahun; 13 orang (48.15%) di antaranya berusia antara 36-45 tahun, dan 10 orang (37.04%) di antaranya berusia lebih dari 27 tahun.

Mengacu pada distribusi usia responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia antara 36-45 tahun dan yang berusia di atas 46.

BAB IV

ANALISIS DATA

Dalam bab IV disajikan analisis terhadap data yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian. Data yang terkumpul tersebut merupakan data primer, yaitu data yang berasal dari jawaban responden terhadap daftar pertanyaan yang dibagikan. Jumlah kuesioner yang lengkap terisi sehingga layak digunakan dalam penelitian ini berjumlah 27 buah.

Analisis data yang dilakukan dalam bab ini pada dasarnya terdiri atas dua bagian, bagian pertama merupakan analisis deskriptif terhadap masing-masing variabel penelitian; sedangkan bagian kedua merupakan analisis data yang bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis. Selain analisis tersebut, dalam bab ini juga dilakukan deskripsi responden dan pengujian validitas dan reliabilitas daftar pertanyaan yang digunakan.

4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

4.1.1. Uji Validitas

Hasil uji validitas terhadap masing-masing pertanyaan dalam setiap variabel dengan menggunakan analisis faktor disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas

| 1. Pengetahuan Tentang Anggaran | | | |
|--|-----------------------|----------------|------------|
| No. | <i>Laoding Factor</i> | <i>Cut off</i> | Keterangan |
| 1 | 0.723 | 0.5 | Valid |
| 2 | 0.789 | 0.5 | Valid |
| 3 | 0.829 | 0.5 | Valid |
| 4 | 0.866 | 0.5 | Valid |
| 2. Partisipasi Masyarakat | | | |
| No. | <i>Laoding Factor</i> | <i>Cut off</i> | Keterangan |
| 1 | 0.708 | 0.5 | Valid |
| 2 | 0.912 | 0.5 | Valid |
| 3 | 0.779 | 0.5 | Valid |
| 4 | 0.862 | 0.5 | Valid |
| 5 | 0.813 | 0.5 | Valid |
| 6 | 0.832 | 0.5 | Valid |
| 7 | 0.896 | 0.5 | Valid |
| 3. Transparasi Kebijakan Publik | | | |
| No. | <i>Laoding Factor</i> | <i>Cut off</i> | Keterangan |
| 1 | 0.748 | 0.5 | Valid |
| 2 | 0.625 | 0.5 | Valid |
| 3 | 0.899 | 0.5 | Valid |
| 4 | 0.794 | 0.5 | Valid |
| 5 | 0.718 | 0.5 | Valid |
| 4. Pengawasan Keuangan Daerah | | | |
| No. | <i>Laoding Factor</i> | <i>Cut off</i> | Keterangan |
| 1 | 0.837 | 0.5 | Valid |
| 2 | 0.694 | 0.5 | Valid |
| 3 | 0.533 | 0.5 | Valid |
| 4 | 0.902 | 0.5 | Valid |
| 5 | 0.818 | 0.5 | Valid |
| 6 | 0.713 | 0.5 | Valid |
| 7 | 0.789 | 0.5 | Valid |
| 8 | 0.794 | 0.5 | Valid |
| 9 | 0.756 | 0.5 | Valid |
| 10 | 0.804 | 0.5 | Valid |

Variabel Pengetahuan tentang Anggaran diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri atas 4 pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis faktor yang telah dilakukan terhadap kuesioner tersebut (Lampiran 2), ternyata besarnya indikator kecukupan sample (*measure of sampling adequacy*) Kaiser-Meyer-Olkin adalah sebesar 0.625. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0.5; maka analisis faktor layak dilakukan terhadap kuesioner pengukur variabel Pengetahuan tentang Anggaran. Berdasarkan nilai *loading factor* yang disajikan dalam Tabel 4.1. di atas tampak bahwa, masing-masing pertanyaan memiliki *loading factor* > 0.50. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner Pengetahuan tentang Anggaran tersebut valid.

Variabel Partisipasi Masyarakat diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri atas 7 pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis faktor yang telah dilakukan terhadap kuesioner tersebut (Lampiran 2), ternyata besarnya indikator kecukupan sample (*measure of sampling adequacy*) Kaiser-Meyer-Olkin adalah sebesar 0.837. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0.5; maka analisis faktor layak dilakukan terhadap kuesioner pengukur variabel Partisipasi Masyarakat. Berdasarkan nilai *loading factor* yang disajikan dalam Tabel 4.1. di atas tampak bahwa, masing-masing pertanyaan memiliki *loading factor* > 0.50. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner Partisipasi Masyarakat tersebut valid.

Variabel Transparansi Kebijakan Publik diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri atas 5 pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis faktor yang telah dilakukan terhadap kuesioner tersebut (Lampiran 2), ternyata besarnya

indikator kecukupan sample (*measure of sampling adequacy*) Kaiser-Meyer-Olkin adalah sebesar 0.657. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0.5; maka analisis faktor layak dilakukan terhadap kuesioner pengukur variabel Transparansi Kebijakan Publik. Berdasarkan nilai *loading factor* yang disajikan dalam Tabel 4.1. di atas tampak bahwa, masing-masing pertanyaan memiliki *loading factor* > 0.50. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner Transparansi Kebijakan Publik tersebut valid.

Variabel Pengawasan Keuangan Daerah diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri atas 10 pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis faktor yang telah dilakukan terhadap kuesioner tersebut (Lampiran 1), ternyata besarnya indikator kecukupan sample (*measure of sampling adequacy*) Kaiser-Meyer-Olkin adalah sebesar 0.714. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0.5; maka analisis faktor layak dilakukan terhadap kuesioner pengukur variabel Pengawasan Keuangan Daerah. Berdasarkan nilai *loading factor* yang disajikan dalam Tabel 4.1. di atas tampak bahwa, masing-masing pertanyaan memiliki *loading factor* > 0.50. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner Pengawasan Keuangan Daerah tersebut valid.

4.1.2. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas terhadap kuesioner pengukur variabel penelitian dengan menggunakan metode Alpha-Cronbach disajikan dalam Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2.
Hasil Uji Reliabilitas

| No. | Variabel | Alpa-Cronbach | Keterangan |
|-----|------------------------------|---------------|------------|
| 1 | Pengetahuan Tentang Anggaran | 0.753 | Reliabel |
| 2 | Partisipasi Masyarakat | 0.867 | Reliabel |
| 3 | Transparasi Kebijakan Publik | 0.771 | Reliabel |
| 4 | Pengawasan Keuangan Daerah | 0.852 | Reliabel |

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap masing-masing kuesioner pengukur variabel penelitian di atas tampak bahwa, masing-masing kuesioner memiliki nilai Alpha-Cronbach > 0.70; sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

Mengacu pada hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara statistik layak digunakan sebagai alat pengumpul data, karena telah memenuhi validitas dan reliabilitas yang dipersyaratkan.

4.2. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi dari masing-masing skor variabel penelitian disajikan dalam Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2.
Deskripsi Variabel Penelitian

| Variabel | Mean | Standart Deviation | N |
|----------|---------|--------------------|----|
| Y | 3.2778 | 0.6339 | 27 |
| X | 3.4815 | 0.6121 | 27 |
| Z1 | 3.4870 | 0.6575 | 27 |
| Z2 | 3.3630 | 0.4369 | 27 |
| ZX1 | 12.3337 | 3.4896 | 27 |
| ZX2 | 11.7556 | 2.6354 | 27 |

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 4.2 di atas tampak bahwa, variabel Pengawasan Keuangan Daerah memiliki rata-rata skor sebesar 3.2778; hal ini menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah tersebut tergolong Baik. Standar deviasi sebesar 0.6339, hal ini menunjukkan bahwa ukuran penyebaran variabel Pengawasan Keuangan Daerah dari 27 orang responden tersebut adalah sebesar 0.6339.

Variabel Pengetahuan Tentang Anggaran memiliki rata-rata skor sebesar 3.4815; hal ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat tersebut tergolong Baik. Standar deviasi sebesar 0.6121, hal ini menunjukkan bahwa ukuran penyebaran variabel Partisipasi Masyarakat dari 27 orang responden tersebut adalah sebesar 0.6121.

Variabel Partisipasi Masyarakat memiliki rata-rata skor sebesar 3.4870; hal ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat tersebut tergolong Baik. Standar deviasi sebesar 0.6575, hal ini menunjukkan bahwa ukuran penyebaran

variabel Partisipasi Masyarakat dari 27 orang responden tersebut adalah sebesar 0.6575.

Variabel Transparasi Kebijakan Publik memiliki rata-rata skor sebesar 3.4870; hal ini menunjukkan bahwa Transparasi Kebijakan Publik tersebut tergolong Baik. Standar deviasi sebesar 0.6575, hal ini menunjukkan bahwa ukuran penyebaran variabel v dari 27 orang responden tersebut adalah sebesar 0.6575.

4.2.1. Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam variabel Pengawasan Keuangan Daerah, maka diperoleh distribusi kategori skor variabel Pengawasan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Distribusi Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

| Kategori | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Sangat Baik | 0 | 0.00 |
| Baik | 11 | 40.74 |
| Cukup Baik | 10 | 37.04 |
| Kurang Baik | 6 | 22.22 |
| Sangat Kurang Baik | 0 | 0.00 |
| Jumlah | 27 | 100.00 |

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan distribusi kategori variabel yang disajikan dalam Tabel 4.3 di atas tampak bahwa, dari 27 orang responden 11 orang (40.74%) di antaranya dapat melakukan pengawasan keuangan daerah dengan Baik; 10 orang (37.04%)

di antaranya dapat melakukan pengawasan keuangan daerah dengan Cukup Baik, dan ang (22.22%) di antaranya dapat melakukan pengawasan keuangan daerah dengan Kurang baik.

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa, Pengawasan Keuangan Daerah yang selama ini dilakukan oleh para anggota dewan tergolong Baik.

4.2.2. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam variabel Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, maka diperoleh distribusi kategori skor variabel Pengetahuan Dewan tentang Anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.4
Distribusi Variabel Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

| Kategori | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Sangat Baik | 3 | 11.11 |
| Baik | 2 | 7.41 |
| Cukup Baik | 12 | 44.44 |
| Kurang Baik | 10 | 37.04 |
| Sangat Kurang Baik | 0 | 0.00 |
| Jumlah | 27 | 100.00 |

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan distribusi kategori variabel yang disajikan dalam Tabel 4.4 di atas tampak bahwa, dari 27 orang responden 3 orang (11.11%) memiliki pengetahuan tentang anggaran yang tergolong Sangat Baik, 2 orang (7.41%)

memiliki pengetahuan tentang anggaran yang tergolong Baik, 12 orang (44.44%) memiliki pengetahuan tentang anggaran yang tergolong Cukup Baik, dan 10 orang (37.04%) memiliki pengetahuan tentang anggaran yang tergolong Kurang Baik.

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa, Pengetahuan Dewan tentang Anggaran yang selama ini dimiliki para anggota dewan tergolong Cukup Baik.

4.2.3. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam variabel Partisipasi Masyarakat, maka diperoleh distribusi kategori skor variabel Partisipasi Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 4.5
Distribusi Variabel Partisipasi Masyarakat

| Kategori | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|--------------------|----------------|----------------|
| Sangat Baik | 0 | 0.00 |
| Baik | 10 | 37.04 |
| Cukup Baik | 13 | 48.15 |
| Kurang Baik | 3 | 11.11 |
| Sangat Kurang Baik | 1 | 3.70 |
| Jumlah | 27 | 100.00 |

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan distribusi kategori variabel yang disajikan dalam Tabel 4.5 di atas tampak bahwa, dari 27 orang responden 10 orang (37.04%) memiliki partisipasi yang tergolong Baik, 13 orang (48.15%) memiliki partisipasi yang

tergolong Cukup Baik, 3 orang (11.11%) memiliki partisipasi yang tergolong Kurang Baik, dan 1 orang (3.70%) memiliki partisipasi yang tergolong Kurang Sangat Kurang Baik.

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa, Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan anggaran tergolong Cukup Baik.

4.2.4. Transparansi Kebijakan Publik

Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam variabel Transparansi Kebijakan Publik, maka diperoleh distribusi kategori skor variabel Partisipasi Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 4.6
Distribusi Variabel Transparansi Kebijakan Publik

| Kategori | Jumlah (orang) | Persentase (%) |
|--------------------|----------------|----------------|
| Sangat Baik | 2 | 7.41 |
| Baik | 6 | 22.22 |
| Cukup Baik | 7 | 25.93 |
| Kurang Baik | 11 | 40.74 |
| Sangat Kurang Baik | 1 | 3.70 |
| Jumlah | 27 | 100.00 |

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan distribusi kategori variabel yang disajikan dalam Tabel 4.6 di atas tampak bahwa, dari 27 orang responden 2 orang (7.41%) memiliki persepsi bahwa transparansi kebijakan publik telah berjalan Sangat Baik, 6 orang (22.22%) memiliki persepsi bahwa transparansi kebijakan publik telah berjalan Baik, 7

orang (25.93%) memiliki persepsi bahwa transparansi kebijakan publik telah berjalan Cukup Baik, 11 orang (40.74%) memiliki persepsi bahwa transparansi kebijakan publik telah berjalan Kurang Baik, dan 1 orang (3.70%) memiliki persepsi bahwa transparansi kebijakan publik telah berjalan Sangat Kurang Baik,

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa, Transparansi Kebijakan Publik dalam penyusunan anggaran yang selama ini berjalan tergolong Cukup Baik.

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Autokorelasi

Pengujian ada tidaknya autokorelasi yang signifikan dilakukan dengan mengacu pada pendapat Gujarati (2003), yaitu: jika nilai statistik Durbin-Watson (DW) mendekati 2, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, diperoleh besarnya nilai statistik $DW=1.952$, karena nilai $DW=1.952$ mendekati 2, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam model regresi yang diperoleh tersebut tidak terjadi autokorelasi yang signifikan, sehingga model regresi memenuhi asumsi tersebut.

4.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian terhadap ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan melalui pengujian signifikansi korelasi Spearman antara variabel bebas dengan nilai absolut residual. Jika korelasi tersebut signifikan, berarti terjadi heteroskedastisitas (Gujarati, 2003). Hasil perhitungan koefisien korelasi

Spearman antara variabel bebas dengan nilai absolut residual adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Heteroskedastisitas

| Variabel yang dikorelasikan | Korelasi Spearman | p |
|-----------------------------|-------------------|-------|
| X | -0.139 | 0.488 |
| Z1 | 0.126 | 0.497 |
| Z2 | 0.144 | 0.320 |
| Z1X | 0.063 | 0.756 |
| Z2X | -0.027 | 0.893 |

Sumber: Lampiran 3.

Berdasarkan hasil analisis korelasi Spearman di atas tampak bahwa, masing-masing variabel bebas memiliki korelasi Spearman dengan nilai absolut residual yang tidak signifikan ($p > 0.05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas sehingga memenuhi asumsi tersebut.

4.3.3. Uji Multikolinearitas

Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan uji VIF (Gujarati, 2003). Jika suatu variabel bebas memiliki $VIF < 10$, maka variabel bebas tersebut tidak mengalami multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Hasil perhitungan VIF untuk masing-masing variabel bebas disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Uji Multikolinearitas

| Variabel Bebas | VIF |
|----------------|-------|
| X | 2.555 |
| Z1 | 6.727 |
| Z2 | 4.719 |
| Z1X | 5.610 |
| Z2X | 2.849 |

Sumber: Lampiran 3.

Berdasarkan hasil perhitungan VIF yang disajikan dalam tabel di atas tampak bahwa, masing-masing variabel bebas memiliki nilai $VIF < 10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas tidak menunjukkan adanya multikolinearitas yang signifikan, sehingga asumsi tersebut terpenuhi.

4.4. Analisis Regresi

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pengujian hipotesis adalah regresi dengan variabel moderasi (*Moderated Regression Analysis, MRA*) yang dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a_0 + b_1X + b_2Z_1 + b_3Z_2 + b_4Z_1X + b_5Z_2X$$

Keterangan:

- Y : Pengawasan Keuangan Daerah
- X : Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran
- Z₁ : Partisipasi Masyarakat.
- Z₂ : Transparansi Kebijakan Publik
- Z₁X : Interaksi antara Z₁ dengan X
- Z₂X : Interaksi antara Z₂ dengan X
- ε : *Error term*

Berdasarkan hasil analisis regresi telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| Variabel Bebas | Koefisien Regresi (b) | Sig. |
|---|-----------------------|-------|
| Constant | 127.655 | |
| Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X) | 11.014 | 0.000 |
| Partisipasi Masyarakat (Z1) | 0.619 | 0.353 |
| Transparansi Kebijakan Publik (Z2) | 4.767 | 0.011 |
| Interaksi Z1X | 0.158 | 0.011 |
| Interaksi Z2X | 0.422 | 0.008 |
| N=27 R ² adj=0.940; Statistik Durbin-Watson=1.952 | | |

Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.8 di atas maka dapat dituliskan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 127.655 + 11.014X + 0.619Z_1 + 4.767Z_2 + 0.158Z_1X + 0.422Z_2X$$

Nilai koefisien determinasi adjusted (R²adj) sebesar 0.940 atau 94.0%; hal ini dapat diinterpretasikan bahwa, variasi yang terjadi pada variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y); 94.0% dipengaruhi atau disebabkan oleh perubahan yang terjadi secara bersama-sama pada variabel Pengetahuan tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik; sedangkan 6% sisanya disebabkan oleh variabel-variabel lain yang tidak tercakup dalam model regresi tersebut.

4.5. Pengujian Hipotesis

4.5.1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa: Pengetahuan Dewan tentang Anggaran berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.9, pengaruh tersebut ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar $b_1=11.014$ dengan $p=0.000$. Jika digunakan tingkat signifikansi (α)=5% atau 0.05; ternyata $p(0.000) < \alpha(0.05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan anggota dewan tentang Anggaran memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah yang dilakukannya. Semakin tinggi tingkat kemampuan anggota terhadap hal-hal yang berkaitan dengan anggaran, maka pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukannya akan semakin baik.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Indradi, 2001; Syansiar, 2001; 20002; Sutarnoto, 2002; Sopanah, 2003). Merujuk dari Yudono(2002) bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknik penyelenggaraan pemerintah, kebijakan public dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran, karena dengan begitu diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Berdasarkan hasil penelitian dari Sopanah (2003), diperoleh kesimpulan bahwa kualitas anggota dewan yang dapat diukur

dari pengetahuan yang dimilikinya akan mempengaruhi kinerja dewan khususnya pada saat melakukan pengawasan keuangan daerah. Seperti kita tahu, saat ini jabatan sebagai anggota dewan masih diinginkan bagi sekelompok orang tertentu untuk berbagai macam tujuan tanpa memikirkan kualitas yang dimiliki para anggota dewan tersebut. Salah satu diantara tujuan tersebut adalah keinginan untuk meningkatkan derajatnya dimata masyarakat umum, serta untuk mencari kesenangan pribadi dalam mencari keuntungan semata. Untuk memperoleh tujuan tersebut, sebagian anggota dewan tidak memperhatikan kualitas pendidikan dan pengalaman yang mereka miliki. Padahal salah satu kunci sukses keberhasilan pembangunan daerah terletak pada kualitas anggota dewan daerah tersebut, dimana dewan memegang peranan penting dalam pengawasan keuangan daerah. Suatu daerah yang memiliki kualitas anggota dewan yang berpendidikan dan berpengalaman maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan akan semakin meningkat sehingga dapat terciptanya keberhasilan daerah tersebut dalam pembangunan.

4.4.2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa: Partisipasi masyarakat mempengaruhi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, variabel ini memiliki koefisien regresi sebesar $b_4=0.158$ dengan $p=0.011$. Jika digunakan tingkat signifikansi (α)=5% atau 0.05; ternyata $p(0.011) < \alpha(0.05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa, Partisipasi masyarakat memiliki

pengaruh yang positif dan signifikan pada pengaruh Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap Pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat diinterpretasikan, jika Partisipasi masyarakat semakin baik maka pengaruh Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap Pengawasan keuangan daerah akan semakin kuat; atau sebaliknya, jika Partisipasi masyarakat semakin rendah atau kurang baik maka pengaruh Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap Pengawasan keuangan daerah akan semakin lemah.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Sopanah (2003) yang menyimpulkan bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan dewan. Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan dalam Saleh (2004) pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam negara.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dapat terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan masukan berupa aspirasi dan direalisasikan dengan adanya forum komunikasi antar dewan dan masyarakat yang diselenggarakan. Partisipasi masyarakat tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan pengawasan saja, namun dilakukan sejak dewan melakukan kegiatan penyusunan arah dan kebijakan umum APBD. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka dewan dengan kemampuan pengetahuan yang dimilikinya dapat mulai menyerap keinginan masyarakat dan merealisasikannya dalam APBD.

Sehingga pada saat kegiatan pelaksanaan dan pengawasan APBD, masyarakat dapat benar-benar berpartisipasi dan akhirnya tercapailah pengawasan keuangan yang baik sehingga keberhasilan pembangunan daerah pun tercapai.

4.4.3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa: Transparansi kebijakan publik mempengaruhi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.12 di muka, besarnya koefisien regresi $b_5=0.442$ dengan $p=0.008$. Jika digunakan tingkat signifikansi (α)=5% atau 0.05; ternyata $p(0.008) < \alpha(0.05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa, Transparansi kebijakan publik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada pengaruh Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap Pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat diinterpretasikan, jika Transparansi kebijakan publik semakin baik maka pengaruh Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap Pengawasan keuangan daerah akan semakin kuat; atau sebaliknya, jika Transparansi kebijakan publik semakin rendah atau kurang baik maka pengaruh Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap Pengawasan keuangan daerah akan semakin lemah.

BAB V

KESIMPULAN

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab ini disampaikan kesimpulan, saran serta keterbatasan penelitian. Kesimpulan dan saran yang disampaikan ini pada dasarnya merupakan kesimpulan dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan. Hal ini dibuktikan dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0.000 dimana nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ dan hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif 11.014 artinya adalah semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin meningkat. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Sopanah (2003) yang menyimpulkan bahwa bahwa kualitas anggota dewan yang dapat diukur dari pengetahuan yang dimilikinya akan mempengaruhi kinerja dewan khususnya pada saat melakukan pengawasan keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat kemampuan anggota terhadap hal-hal yang berkaitan dengan anggaran,

maka pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukannya akan semakin baik.

2. Interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0.011 dimana nilai signifikansi $0.011 < 0.05$ sedangkan hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif 0.158 artinya adalah semakin tinggi interaksi pengetahuan anggaran yang dimiliki dewan dengan partisipasi masyarakat maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin meningkat. Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Sopanah (2003) yang menyimpulkan bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan dewan
3. Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0.008 dimana $0.008 < 0.05$ dan hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah 0.422 artinya adalah semakin tinggi interaksi pengetahuan anggaran yang dimiliki dewan dengan transparansi kebijakan publik maka pengawasan keuangan

daerah yang dilakukan dewan akan semakin meningkat.

5.2. Saran

1. Agar proses pengawasan keuangan daerah dapat berjalan dengan lebih baik, sebaiknya perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Dengan partisipasi masyarakat yang lebih baik, maka proses pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan akan lebih terjamin bahwa anggota dewan bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Selain itu yang perlu mendapat peningkatan atau perbaikan adalah transparansi kebijakan publik. Dengan kebijakan yang lebih transparan akan mampu mengurangi kemungkinan dewan untuk berbuat tidak benar sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.
2. Bagi para peneliti lain yang berminat mengkaji ulang penelitian ini sebaiknya dapat melakukannya di beberapa daerah/kota sehingga diperoleh responden atau sampel yang lebih banyak, sedemikian rupa generalisasi hasil penelitian akan lebih baik.

5.3. Keterbatasan

Penelitian ini menggunakan sampel yang relatif sedikit yaitu hanya 27 anggota dewan. Ditinjau dari aspek metodologis penggunaan sampel sebanyak 27 tersebut belum dapat menjamin validitas hasil analisis yang dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*, Tesis S2 MAP, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1997.
- Anthony, Govindarajan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta, 2003.
- Azwar, S, *Reliabilitas dan Validitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Halim A., Achamad Tjahjono, dan Muh. Fakhri Hesein, *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Revisi, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2000.
- Halim A. , *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2001.
- Hair, *et al*, *Multivariate Data Analysis*. Fifth Edition, Prentice-Hall International, New Jersey, 1998.
- Indradi, Syamsiar, *Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman anggota DPRD dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Tesis S2 Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang, 2001.
- Jurusan Akuntansi FE UII, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UII*, 2003.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- _____, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- _____, *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 3(2). 2001, Hal 441-456.
- Republik Indonesia, *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2004.
- _____, *Keputusan MENDAGRI R.I No. 4 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000*.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.

_____, *Undang-undang Otonomi Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2004.

_____, *Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 1999 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran*, Citra Umbara, Bandung, 2001.

_____, *Ketetapan MRP Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP).

_____, *Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.

Pramono, Agus H., *Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang, 2002.

Sekaran, Uma, *Business Research Methods*. Mc.Graw-Hill Book Company, Inc., New York, 1992.

Sharma, S. Richard. M. Durand, and O. Gur-Arie. "Identification and Analysis of Moderator Variables", *Journal of Marketing Research*, 18, Aug., pp. 291.

Sopannah, dan Mardiasmo, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*, Simposium Nasional Akuntansi VI, Semarang, 2003, Hal 1160-1173.

Suryabrata, S, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000.

Sutamoto, Tejo, Pengaruh Kualitas SDM Aparatur terhadap Kinerja Pegawai, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang, 2002.

Yudono, Bambang, *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, <http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela3.htm>, 2002.

Zainuddin *et al.*, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.





جامعة الإسلام في إندونيسيا

DAFTAR PERTANYAAN

IDENTITAS RESPONDEN:

Berikan tanda silang (x) pada jawaban yang Saudara anggap sesuai:

Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita

Usia :
 a. 21 - 35 tahun
 b. 36 - 45 tahun
 c. > 46 tahun

Pendidikan Terakhir :
 a. SLTA
 b. Akademin/D3
 c. S1
 d. S2
 e. S3

Komisi :
 a. Komisi C
 b. Panitia Anggaran

Petunjuk Pengisian :
 Berikan tanda silang pada kolom alternatif jawaban yang telah tersedia, untuk jawaban yang paling tepat menurut persepsi Anda.

Keterangan :
 STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1)
 TS : Tidak Setuju (Skor 2)
 N : Netral (Skor 3)
 S : Setuju (Skor 4)
 SS : Sangat Setuju (Skor 5)

PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN

| No. | Pertanyaan | STS | TS | N | S | SS |
|-----|--|-----|----|---|---|----|
| 1. | Anda sebagai anggota Dewan perlu untuk memiliki pengetahuan tentang penyusunan APBD. | | | | | |
| 2. | Anda sebagai anggota Dewan perlu untuk memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan APBD. | | | | | |
| 3. | Anda sebagai anggota Dewan perlu memiliki pengetahuan untuk mendeteksi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD. | | | | | |
| 4. | Anda sebagai anggota Dewan perlu memiliki pengetahuan untuk mendeteksi terjadinya pemborosan dan kegagalan dalam pelaksanaan APBD. | | | | | |

PARTISIPASI MASYARAKAT

| No. | Pertanyaan | STS | TS | N | S | SS |
|-----|---|-----|----|---|---|----|
| 1. | Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD selalu melibatkan masyarakat. | | | | | |
| 2. | Prioritas dan rencana APBD selalu mempertimbangkan usulan dan kritik masyarakat. | | | | | |
| 3. | Dalam penyusunan APBD selalu melibatkan masyarakat. | | | | | |
| 4. | Dalam advokasi APBD selalu melibatkan masyarakat. | | | | | |
| 5. | Dalam konsultasi dan konfirmasi antara dewan dan pemerintah daerah berkaitan dengan rancangan APBD, selalu melibatkan masyarakat. | | | | | |
| 6. | Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBD. | | | | | |
| 7. | Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD. | | | | | |

TRANSPARASI KEBIJAKAN PUBLIK

| No. | Pertanyaan | STS | TS | N | S | SS |
|-----|--|-----|----|---|---|----|
| 1. | Selama ini pemerintah daerah selalu memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusunnya. | | | | | |
| 2. | Selama ini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat dengan mudah diakses atau diperoleh masyarakat. | | | | | |
| 3. | Selama ini pemerintah selalu tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. | | | | | |
| 4. | Selama ini usulan masyarakat selalu diakomodasi dalam penyusunan anggaran guna mencapai transparansi yang lebih baik. | | | | | |
| 5. | Saat ini pemerintah daerah telah memiliki sistem informasi mengenai kebijakan anggarannya. | | | | | |

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

| No. | Pertanyaan | STS | TS | N | S | SS |
|-----|---|-----|----|---|---|----|
| 1. | Anggota Dewan selalu dilibatkan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD | | | | | |
| 2. | Anggota Dewan selalu melakukan analisis politik terhadap proses penyusunan APBD | | | | | |
| 3. | Anggota Dewan selalu dilibatkan dalam pengeesahan APBD | | | | | |
| 4. | Anggota Dewan memiliki kemampuan menjelaskan APBD yang telah disusun pihak pemerintah. | | | | | |
| 5. | Anggota Dewan harus meyakinkan bahwa APBD telah memiliki transparansi. | | | | | |
| 6. | Anggota Dewan harus selalu memantau pelaksanaan APBD | | | | | |
| 7. | Anggota Dewan selalu mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban yang disusun pemerintah. | | | | | |
| 8. | Evaluasi yang dilakukan Dewan mencakup faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD. | | | | | |
| 9. | Anggota Dewan selalu meminta keterangan berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota | | | | | |
| 10. | Anggota Dewan selalu mengusut dan menindaklanjuti jika terjadi kejanggalan dalam LPJ APBD | | | | | |



LAMPIRAN II

Uji Validitas dan Rentabilitas Kuesioner

Factor Analysis - Uji Validitas Pengetahuan tentang Anggaran

Descriptive Statistics

| | Mean | Std. Deviation | Analysis N |
|-----|------|----------------|------------|
| x11 | 3.81 | .483 | 27 |
| x12 | 3.44 | .641 | 27 |
| x13 | 3.48 | .580 | 27 |
| X14 | 3.52 | .643 | 27 |

Correlation Matrix

| | | x11 | x12 | x13 | X14 |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| Correlation | x11 | 1.000 | .276 | .468 | .197 |
| | x12 | .276 | 1.000 | .437 | .540 |
| | x13 | .468 | .437 | 1.000 | .646 |
| | X14 | .197 | .540 | .646 | 1.000 |
| Sig. (1-tailed) | x11 | | .082 | .007 | .162 |
| | x12 | .082 | | .011 | .002 |
| | x13 | .007 | .011 | | .000 |
| | X14 | .162 | .002 | .000 | |

KMO and Bartlett's Test^a

| | | |
|--|--------------------|--------|
| Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. | | .625 |
| Bartlett's Test of Sphericity | Approx. Chi-Square | 28.637 |
| | df | 6 |
| | Sig. | .000 |

a. Based on correlations

Anti-image Matrices

| | | x11 | x12 | x13 | X14 |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anti-image Covariance | x11 | .742 | -.115 | -.257 | .122 |
| | x12 | -.115 | .677 | -.028 | -.225 |
| | x13 | -.257 | -.028 | .461 | -.266 |
| | X14 | .122 | -.225 | -.266 | .480 |
| Anti-image Correlation | x11 | .561 ^a | -.162 | -.440 | .205 |
| | x12 | -.162 | .751 ^a | -.051 | -.395 |
| | x13 | -.440 | -.051 | .616 ^a | -.566 |
| | X14 | .205 | -.395 | -.566 | .590 ^a |

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

| | Raw | | Rescaled | |
|-----|---------|------------|----------|------------|
| | Initial | Extraction | Initial | Extraction |
| x11 | .234 | .052 | 1.000 | .223 |
| x12 | .410 | .255 | 1.000 | .622 |
| x13 | .336 | .231 | 1.000 | .687 |
| X14 | .413 | .310 | 1.000 | .749 |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

| | Component | Initial Eigenvalues ^a | | |
|----------|-----------|----------------------------------|---------------|--------------|
| | | Total | % of Variance | Cumulative % |
| Raw | 1 | .848 | 60.867 | 60.867 |
| | 2 | .240 | 17.199 | 78.066 |
| | 3 | .213 | 15.300 | 93.366 |
| | 4 | .092 | 6.634 | 100.000 |
| Rescaled | 1 | .848 | 60.867 | 60.867 |
| | 2 | .240 | 17.199 | 78.066 |
| | 3 | .213 | 15.300 | 93.366 |
| | 4 | .092 | 6.634 | 100.000 |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

| | Component | Extraction Sums of Squared Loadings | | |
|----------|-----------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Total | % of Variance | Cumulative % |
| Raw | 1 | .848 | 60.867 | 60.867 |
| | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| Rescaled | 1 | 2.282 | 57.045 | 57.045 |
| | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

- a. When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution.

Component Matrix^a

| | Raw | Rescaled |
|-----|-----------|-----------|
| | Component | Component |
| | 1 | 1 |
| x11 | .829 | .723 |
| x12 | .605 | .789 |
| x13 | .781 | .829 |
| X14 | .656 | .866 |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

- a. 1 components extracted.

Reliability

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 27 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 27 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .753 | 4 |

Item Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|-----|------|----------------|----|
| x11 | 3.81 | .483 | 27 |
| x12 | 3.44 | .641 | 27 |
| x13 | 3.48 | .580 | 27 |
| X14 | 3.52 | .643 | 27 |

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-----|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| x11 | 10.44 | 2.410 | .702 | .778 |
| x12 | 10.81 | 1.849 | .540 | .703 |
| x13 | 10.78 | 1.795 | .688 | .617 |
| X14 | 10.74 | 1.738 | .619 | .654 |

Scale Statistics

| Mean | Variance | Std. Deviation | N of Items |
|-------|----------|----------------|------------|
| 14.26 | 3.199 | 1.789 | 4 |

Factor Analysis - Uji Validitas Transparansi Kebijakan Publik

KMO and Bartlett's Test

| | | |
|--|--------------------|--------|
| Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. | | .657 |
| Bartlett's Test of Sphericity | Approx. Chi-Square | 20.504 |
| | df | 10 |
| | Sig. | .025 |

Anti-Image Matrices

| | | Z21 | Z22 | Z23 |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anti-image Covariance | Z21 | .638 | -.100 | .062 |
| | Z22 | -.100 | .813 | -.109 |
| | Z23 | .062 | -.109 | .803 |
| | Z24 | -.255 | -.164 | -.231 |
| | Z25 | .267 | -.023 | .113 |
| Anti-image Correlation | Z21 | .621 ^a | -.139 | .086 |
| | Z22 | -.139 | .783 ^a | -.135 |
| | Z23 | .086 | -.135 | .669 ^a |
| | Z24 | -.408 | -.232 | -.329 |
| | Z25 | .369 | -.029 | .139 |

Anti-image Matrices

| | | Z24 | Z25 |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| Anti-image Covariance | Z21 | -.255 | .267 |
| | Z22 | -.164 | -.023 |
| | Z23 | -.231 | .113 |
| | Z24 | .613 | -.036 |
| | Z25 | -.036 | .818 |
| Anti-image Correlation | Z21 | -.408 | .369 |
| | Z22 | -.232 | -.029 |
| | Z23 | -.329 | .139 |
| | Z24 | .648 ^a | -.050 |
| | Z25 | -.050 | .613 ^a |

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

| | Initial | Extraction |
|-----|---------|------------|
| Z21 | 1.000 | .560 |
| Z22 | 1.000 | .391 |
| Z23 | 1.000 | .359 |
| Z24 | 1.000 | .630 |
| Z25 | 1.000 | .278 |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

| Component | Initial Eigenvalues | | |
|-----------|---------------------|---------------|--------------|
| | Total | % of Variance | Cumulative % |
| 1 | 2.218 | 44.359 | 44.359 |
| 2 | .984 | 19.671 | 64.030 |
| 3 | .779 | 15.584 | 79.614 |
| 4 | .628 | 12.550 | 92.165 |
| 5 | .392 | 7.835 | 100.000 |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

| Component | Extraction Sums of Squared Loadings | | |
|-----------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | Total | % of Variance | Cumulative % |
| 1 | 2.218 | 44.359 | 44.359 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

| | Component |
|-----|-----------|
| | 1 |
| Z21 | .748 |
| Z22 | .625 |
| Z23 | .899 |
| Z24 | .794 |
| Z25 | .718 |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.



Reliability

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 27 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 27 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .771 | 5 |

Item Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|-----|------|----------------|----|
| Z21 | 3.52 | .509 | 27 |
| Z22 | 3.81 | .396 | 27 |
| Z23 | 3.48 | .509 | 27 |
| Z24 | 3.41 | .501 | 27 |
| Z25 | 3.48 | .509 | 27 |

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-----|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Z21 | 14.19 | 1.157 | .639 | .266 |
| Z22 | 13.89 | 1.179 | .762 | .171 |
| Z23 | 14.22 | 1.103 | .745 | .214 |
| Z24 | 14.30 | .909 | .643 | -.038 ^a |
| Z25 | 14.22 | 1.872 | .751 | .674 |

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

Scale Statistics

| Mean | Variance | Std. Deviation | N of Items |
|-------|----------|----------------|------------|
| 17.70 | 1.678 | 1.295 | 5 |

Factor Analysis - Uji Validitas Partisipasi Masyarakat

KMO and Bartlett's Test

| | | |
|--|--------------------|---------|
| Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. | | .837 |
| Bartlett's Test of Sphericity | Approx. Chi-Square | 102.163 |
| | df | 21 |
| | Sig. | .000 |

Anti-Image Matrices

| | | Z11 | Z12 | Z13 | Z14 |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anti-image Covariance | Z11 | .445 | -.070 | -.232 | -.012 |
| | Z12 | -.070 | .237 | -.032 | -.063 |
| | Z13 | -.232 | -.032 | .395 | .025 |
| | Z14 | -.012 | -.063 | .025 | .294 |
| | Z15 | .072 | -.118 | -.041 | -.096 |
| | Z16 | -.014 | -.078 | -.057 | -.117 |
| | Z17 | -.014 | -.056 | -.095 | -.137 |
| Anti-image Correlation | Z11 | .791 ^a | -.215 | -.553 | -.034 |
| | Z12 | -.215 | .870 ^a | -.104 | -.238 |
| | Z13 | -.553 | -.104 | .822 ^a | .073 |
| | Z14 | -.034 | -.238 | .073 | .855 ^a |
| | Z15 | .185 | -.414 | -.112 | -.304 |
| | Z16 | -.037 | -.276 | -.155 | -.373 |
| | Z17 | -.024 | -.130 | -.174 | -.289 |

Anti-Image Matrices

| | | Z15 | Z16 | Z17 |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anti-image Covariance | Z11 | .072 | -.014 | -.014 |
| | Z12 | -.118 | -.078 | -.056 |
| | Z13 | -.041 | -.057 | -.095 |
| | Z14 | -.096 | -.117 | -.137 |
| | Z15 | .344 | -.028 | .053 |
| | Z16 | -.028 | .336 | .152 |
| | Z17 | .053 | .152 | .762 |
| Anti-image Correlation | Z11 | .185 | -.037 | -.024 |
| | Z12 | -.414 | -.276 | -.130 |
| | Z13 | -.112 | -.155 | -.174 |
| | Z14 | -.304 | -.373 | -.289 |
| | Z15 | .857 ^a | -.083 | .103 |
| | Z16 | -.083 | .860 ^a | .300 |
| | Z17 | .103 | .300 | .654 ^a |

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

| | Initial | Extraction |
|-----|---------|------------|
| Z11 | 1.000 | .502 |
| Z12 | 1.000 | .831 |
| Z13 | 1.000 | .607 |
| Z14 | 1.000 | .743 |
| Z15 | 1.000 | .661 |
| Z16 | 1.000 | .693 |
| Z17 | 1.000 | .157 |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

| Component | Initial Eigenvalues | | |
|-----------|---------------------|---------------|--------------|
| | Total | % of Variance | Cumulative % |
| 1 | 4.194 | 59.917 | 59.917 |
| 2 | 1.015 | 14.497 | 74.415 |
| 3 | .802 | 11.452 | 85.867 |
| 4 | .326 | 4.653 | 90.520 |
| 5 | .278 | 3.978 | 94.498 |
| 6 | .208 | 2.977 | 97.475 |
| 7 | .177 | 2.525 | 100.000 |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

| Component | Extraction Sums of Squared Loadings | | |
|-----------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | Total | % of Variance | Cumulative % |
| 1 | 4.194 | 59.917 | 59.917 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

| | Component |
|-----|-----------|
| | 1 |
| Z11 | .708 |
| Z12 | .912 |
| Z13 | .779 |
| Z14 | .862 |
| Z15 | .813 |
| Z16 | .832 |
| Z17 | .896 |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Reproduced Correlations

| | | Z11 | Z12 | Z13 | Z14 |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Reproduced Correlation | Z11 | .502 ^b | .646 | .552 | .611 |
| | Z12 | .646 | .831 ^b | .710 | .786 |
| | Z13 | .552 | .710 | .607 ^b | .672 |
| | Z14 | .611 | .786 | .672 | .743 ^b |
| | Z15 | .576 | .742 | .633 | .701 |
| | Z16 | .590 | .759 | .648 | .718 |
| | Z17 | .281 | .361 | .308 | .341 |
| Residual ^a | Z11 | | -.080 | .165 | -.161 |
| | Z12 | -.080 | | -.091 | -.015 |
| | Z13 | .165 | -.091 | | -.165 |
| | Z14 | -.161 | -.015 | -.165 | |
| | Z15 | -.213 | .024 | -.147 | .030 |
| | Z16 | -.115 | -.014 | -.101 | .014 |
| | Z17 | -.004 | -.055 | .014 | -.002 |

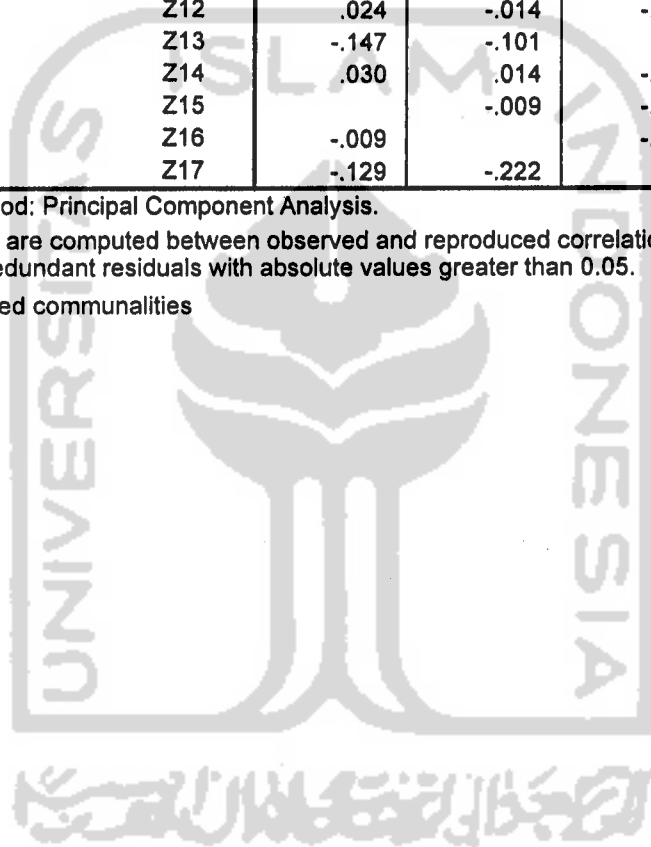
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Reproduced Correlations

| | | Z15 | Z16 | Z17 |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Reproduced Correlation | Z11 | .576 | .590 | .281 |
| | Z12 | .742 | .759 | .361 |
| | Z13 | .633 | .648 | .308 |
| | Z14 | .701 | .718 | .341 |
| | Z15 | .661 ^b | .677 | .322 |
| | Z16 | .677 | .693 ^b | .330 |
| | Z17 | .322 | .330 | .157 ^b |
| Residual ^a | Z11 | -.213 | -.115 | -.004 |
| | Z12 | .024 | -.014 | -.055 |
| | Z13 | -.147 | -.101 | .014 |
| | Z14 | .030 | .014 | -.002 |
| | Z15 | | -.009 | -.129 |
| | Z16 | -.009 | | -.222 |
| | Z17 | -.129 | -.222 | |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

- a. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 12 (57.0%) nonredundant residuals with absolute values greater than 0.05.
- b. Reproduced communalities



Reliability

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 27 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 27 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .867 | 7 |

Item Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|-----|------|----------------|----|
| Z11 | 3.63 | .792 | 27 |
| Z12 | 3.70 | .775 | 27 |
| Z13 | 3.52 | .893 | 27 |
| Z14 | 3.26 | .712 | 27 |
| Z15 | 3.22 | .698 | 27 |
| Z16 | 3.81 | .834 | 27 |
| Z17 | 3.26 | .984 | 27 |

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-----|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Z11 | 20.78 | 13.949 | .621 | .851 |
| Z12 | 20.70 | 12.986 | .835 | .823 |
| Z13 | 20.89 | 12.949 | .701 | .840 |
| Z14 | 21.15 | 13.670 | .774 | .833 |
| Z15 | 21.19 | 14.157 | .687 | .844 |
| Z16 | 20.59 | 13.328 | .695 | .841 |
| Z17 | 21.15 | 14.900 | .779 | .901 |

Scale Statistics

| Mean | Variance | Std. Deviation | N of Items |
|-------|----------|----------------|------------|
| 24.41 | 18.251 | 4.272 | 7 |

Factor Analysis - Uji Validitas Pengawan Keuangan Daerah

KMO and Bartlett's Test

| | | |
|--|--------------------|---------|
| Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. | | .714 |
| Bartlett's Test of Sphericity | Approx. Chi-Square | 199.481 |
| | df | 45 |
| | Sig. | .000 |

Anti-Image Matrices

| | | y1 | y2 | y3 | y4 |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anti-image Covariance | y1 | .200 | -.081 | .018 | -.011 |
| | y2 | -.081 | .157 | -.145 | -.001 |
| | y3 | .018 | -.145 | .249 | -.043 |
| | y4 | -.011 | -.001 | -.043 | .134 |
| | y5 | -.111 | .032 | .034 | -.050 |
| | y6 | .070 | -.115 | .075 | .034 |
| | y7 | -.013 | .022 | .023 | -.087 |
| | y8 | .045 | -.066 | .037 | -.034 |
| | y9 | -.061 | .065 | -.041 | -.021 |
| | y10 | .053 | .061 | -.118 | .006 |
| Anti-image Correlation | y1 | .761 ^a | -.457 | .083 | -.070 |
| | y2 | -.457 | .588 ^a | -.731 | -.007 |
| | y3 | .083 | -.731 | .576 ^a | -.234 |
| | y4 | -.070 | -.007 | -.234 | .857 ^a |
| | y5 | -.622 | .198 | .170 | -.344 |
| | y6 | .307 | -.568 | .293 | .180 |
| | y7 | -.064 | .124 | .102 | -.536 |
| | y8 | .229 | -.385 | .172 | -.214 |
| | y9 | -.255 | .308 | -.152 | -.106 |
| | y10 | .204 | .267 | -.412 | .027 |

Anti-image Matrices

| | | y5 | y6 | y7 | y8 |
|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anti-image Covariance | y1 | -.111 | .070 | -.013 | .045 |
| | y2 | .032 | -.115 | .022 | -.066 |
| | y3 | .034 | .075 | .023 | .037 |
| | y4 | -.050 | .034 | -.087 | -.034 |
| | y5 | .161 | -.106 | .025 | -.028 |
| | y6 | -.106 | .262 | -.070 | .088 |
| | y7 | .025 | -.070 | .196 | -.069 |
| | y8 | -.028 | .088 | -.069 | .190 |
| | y9 | .026 | -.032 | -.010 | -.101 |
| | y10 | -.054 | -.114 | .057 | .009 |
| | Anti-image Correlation | y1 | -.622 | .307 | -.064 |
| y2 | | .198 | -.568 | .124 | -.385 |
| y3 | | .170 | .293 | .102 | .172 |
| y4 | | -.344 | .180 | -.536 | -.214 |
| y5 | | .740 ^a | -.514 | .141 | -.158 |
| y6 | | -.514 | .505 ^a | -.307 | .397 |
| y7 | | .141 | -.307 | .809 ^a | -.359 |
| y8 | | -.158 | .397 | -.359 | .773 ^a |
| y9 | | .121 | -.118 | -.044 | -.431 |
| y10 | | -.235 | -.387 | .223 | .038 |

Anti-image Matrices

| | | y9 | y10 |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| Anti-image Covariance | y1 | -.061 | .053 |
| | y2 | .065 | .061 |
| | y3 | -.041 | -.118 |
| | y4 | -.021 | .006 |
| | y5 | .026 | -.054 |
| | y6 | -.032 | -.114 |
| | y7 | -.010 | .057 |
| | y8 | -.101 | .009 |
| | y9 | .287 | -.133 |
| | y10 | -.133 | .331 |
| Anti-image Correlation | y1 | -.255 | .204 |
| | y2 | .308 | .267 |
| | y3 | -.152 | -.412 |
| | y4 | -.106 | .027 |
| | y5 | .121 | -.235 |
| | y6 | -.118 | -.387 |
| | y7 | -.044 | .223 |
| | y8 | -.431 | .038 |
| | y9 | .792 ^a | -.430 |
| | y10 | -.430 | .519 ^a |

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

| | Initial | Extraction |
|-----|---------|------------|
| y1 | 1.000 | .700 |
| y2 | 1.000 | .482 |
| y3 | 1.000 | .284 |
| y4 | 1.000 | .813 |
| y5 | 1.000 | .669 |
| y6 | 1.000 | .245 |
| y7 | 1.000 | .622 |
| y8 | 1.000 | .630 |
| y9 | 1.000 | .572 |
| y10 | 1.000 | .101 |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

| Component | Initial Eigenvalues | | |
|-----------|---------------------|---------------|--------------|
| | Total | % of Variance | Cumulative % |
| 1 | 5.119 | 51.187 | 51.187 |
| 2 | 1.691 | 16.910 | 68.096 |
| 3 | 1.249 | 12.489 | 80.585 |
| 4 | .871 | 8.712 | 89.298 |
| 5 | .386 | 3.860 | 93.157 |
| 6 | .225 | 2.246 | 95.403 |
| 7 | .178 | 1.781 | 97.184 |
| 8 | .127 | 1.272 | 98.456 |
| 9 | .089 | .890 | 99.346 |
| 10 | .065 | .654 | 100.000 |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

| Component | Extraction Sums of Squared Loadings | | |
|-----------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | Total | % of Variance | Cumulative % |
| 1 | 5.119 | 51.187 | 51.187 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

| | Component |
|-----|-----------|
| | 1 |
| y1 | .837 |
| y2 | .694 |
| y3 | .533 |
| y4 | .902 |
| y5 | .818 |
| y6 | .713 |
| y7 | .789 |
| y8 | .794 |
| y9 | .756 |
| y10 | .804 |

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Reliability

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 27 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 27 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .852 | 10 |

Item Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|-----|------|----------------|----|
| y1 | 3.48 | .700 | 27 |
| y2 | 3.26 | .813 | 27 |
| y3 | 2.70 | 1.382 | 27 |
| y4 | 3.74 | .712 | 27 |
| y5 | 3.30 | .869 | 27 |
| y6 | 2.96 | 1.285 | 27 |
| y7 | 3.67 | .679 | 27 |
| y8 | 3.56 | .847 | 27 |
| y9 | 3.19 | .834 | 27 |
| y10 | 2.93 | 1.238 | 27 |

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-----|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| y1 | 29.30 | 33.909 | .709 | .830 |
| y2 | 29.52 | 33.413 | .650 | .831 |
| y3 | 30.07 | 30.994 | .888 | .854 |
| y4 | 29.04 | 33.499 | .749 | .827 |
| y5 | 29.48 | 32.105 | .743 | .823 |
| y6 | 29.81 | 31.541 | .838 | .849 |
| y7 | 29.11 | 35.026 | .584 | .838 |
| y8 | 29.22 | 33.718 | .584 | .836 |
| y9 | 29.59 | 33.020 | .675 | .829 |
| y10 | 29.85 | 33.593 | .739 | .862 |

Scale Statistics

| Mean | Variance | Std. Deviation | N of Items |
|-------|----------|----------------|------------|
| 32.78 | 40.179 | 6.339 | 10 |



LAMPIRAN III

Distribusi Skor Jawaban Responden

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Summarize - Skor Jawaban Responden

Case Processing Summary^a

| | Cases | | | | | |
|------|----------|---------|----------|---------|-------|---------|
| | Included | | Excluded | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| px1 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| px2 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| px3 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| px4 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| pz11 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| pz12 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| pz13 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| pz14 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| pz15 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| pz16 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| pz17 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| pz21 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| pz22 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| pz23 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| pz24 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| pz25 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| py1 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| py2 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| py3 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| py4 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| py5 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| py6 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| py7 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| py8 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| py9 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |
| py10 | 27 | 100.0% | 0 | .0% | 27 | 100.0% |

a. Limited to first 100 cases.

Case Summaries^a

| | px1 | px2 | px3 | px4 | pz11 |
|---------|-----|-----|-----|-----|------|
| 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 17 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 18 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 27 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Total N | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

Case Summaries^a

| | pz12 | pz13 | pz14 | pz15 | pz16 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 19 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 24 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 26 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total N | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

Case Summaries^a

| | pz17 | pz21 | pz22 | pz23 | pz24 |
|---------|------|------|------|------|------|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 20 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total N | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

Case Summaries^a

| | pz25 | py1 | py2 | py3 | py4 |
|---------|------|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 24 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 26 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Total N | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

Case Summaries^a

| | py5 | py6 | py7 | py8 |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 23 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 24 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 25 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 27 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Total N | 27 | 27 | 27 | 27 |

Case Summaries^a

| | py9 | py10 |
|-------|-----|------|
| 1 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 1 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 1 |
| 9 | 4 | 2 |
| 10 | 3 | 1 |
| 11 | 3 | 1 |
| 12 | 4 | 4 |
| 13 | 3 | 4 |
| 14 | 3 | 3 |
| 15 | 4 | 4 |
| 16 | 4 | 4 |
| 17 | 4 | 4 |
| 18 | 4 | 4 |
| 19 | 3 | 4 |
| 20 | 4 | 4 |
| 21 | 4 | 4 |
| 22 | 4 | 4 |
| 23 | 3 | 2 |
| 24 | 3 | 4 |
| 25 | 3 | 4 |
| 26 | 3 | 3 |
| 27 | 2 | 3 |
| Total | 27 | 27 |

a. Limited to first 100 cases.

Descriptives

Descriptive Statistics

| | N | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|----------------|
| Y | 27 | 3.2778 | .63387 |
| X | 27 | 3.4815 | .61208 |
| Z1 | 27 | 3.4870 | .65745 |
| Z2 | 27 | 3.3630 | .43690 |
| ZX1 | 27 | 12.3337 | 3.48955 |
| ZX2 | 27 | 11.7556 | 2.63542 |
| Valid N (listwise) | 27 | | |



Frequencies

px1

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Netral | 6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| | Setuju | 20 | 74.1 | 74.1 | 96.3 |
| | Sangat Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

px2

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Netral | 17 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| | Setuju | 8 | 29.6 | 29.6 | 92.6 |
| | Sangat Setuju | 2 | 7.4 | 7.4 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

px3

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Netral | 15 | 55.6 | 55.6 | 55.6 |
| | Setuju | 11 | 40.7 | 40.7 | 96.3 |
| | Sangat Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

px4

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Netral | 15 | 55.6 | 55.6 | 55.6 |
| | Setuju | 10 | 37.0 | 37.0 | 92.6 |
| | Sangat Setuju | 2 | 7.4 | 7.4 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

pz11

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| | Netral | 9 | 33.3 | 33.3 | 37.0 |
| | Setuju | 15 | 55.6 | 55.6 | 92.6 |
| | Sangat Setuju | 2 | 7.4 | 7.4 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

pz12

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| | Tidak Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 7.4 |
| | Netral | 4 | 14.8 | 14.8 | 22.2 |
| | Setuju | 20 | 74.1 | 74.1 | 96.3 |
| | Sangat Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

pz13

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| | Tidak Setuju | 2 | 7.4 | 7.4 | 11.1 |
| | Netral | 8 | 29.6 | 29.6 | 40.7 |
| | Setuju | 14 | 51.9 | 51.9 | 92.6 |
| | Sangat Setuju | 2 | 7.4 | 7.4 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

pz14

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| | Tidak Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 7.4 |
| | Netral | 15 | 55.6 | 55.6 | 63.0 |
| | Setuju | 10 | 37.0 | 37.0 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

pz15

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| | Tidak Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 7.4 |
| | Netral | 16 | 59.3 | 59.3 | 66.7 |
| | Setuju | 9 | 33.3 | 33.3 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

pz16

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| | Netral | 6 | 22.2 | 22.2 | 25.9 |
| | Setuju | 16 | 59.3 | 59.3 | 85.2 |
| | Sangat Setuju | 4 | 14.8 | 14.8 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

pz17

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| | Tidak Setuju | 5 | 18.5 | 18.5 | 22.2 |
| | Netral | 9 | 33.3 | 33.3 | 55.6 |
| | Setuju | 10 | 37.0 | 37.0 | 92.6 |
| | Sangat Setuju | 2 | 7.4 | 7.4 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

pz21

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Netral | 13 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
| | Setuju | 14 | 51.9 | 51.9 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

pz22

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Netral | 5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| | Setuju | 22 | 81.5 | 81.5 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

pz23

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Netral | 14 | 51.9 | 51.9 | 51.9 |
| | Setuju | 13 | 48.1 | 48.1 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

pz24

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Netral | 16 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | Setuju | 11 | 40.7 | 40.7 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

pz25

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Netral | 14 | 51.9 | 51.9 | 51.9 |
| | Setuju | 13 | 48.1 | 48.1 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

py1

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak Setuju | 3 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| | Netral | 8 | 29.6 | 29.6 | 40.7 |
| | Setuju | 16 | 59.3 | 59.3 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

py2

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak Setuju | 6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| | Netral | 8 | 29.6 | 29.6 | 51.9 |
| | Setuju | 13 | 48.1 | 48.1 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

py3

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 9 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| | Tidak Setuju | 3 | 11.1 | 11.1 | 44.4 |
| | Netral | 2 | 7.4 | 7.4 | 51.9 |
| | Setuju | 13 | 48.1 | 48.1 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

py4

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| | Tidak Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 7.4 |
| | Netral | 2 | 7.4 | 7.4 | 14.8 |
| | Setuju | 23 | 85.2 | 85.2 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

py5

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| | Tidak Setuju | 4 | 14.8 | 14.8 | 18.5 |
| | Netral | 8 | 29.6 | 29.6 | 48.1 |
| | Setuju | 14 | 51.9 | 51.9 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

py6

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 7 | 25.9 | 25.9 | 25.9 |
| | Tidak Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 29.6 |
| | Netral | 5 | 18.5 | 18.5 | 48.1 |
| | Setuju | 14 | 51.9 | 51.9 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

py7

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| | Netral | 6 | 22.2 | 22.2 | 25.9 |
| | Setuju | 20 | 74.1 | 74.1 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

py8

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| | Tidak Setuju | 3 | 11.1 | 11.1 | 14.8 |
| | Netral | 3 | 11.1 | 11.1 | 25.9 |
| | Setuju | 20 | 74.1 | 74.1 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

py9

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| | Tidak Setuju | 4 | 14.8 | 14.8 | 18.5 |
| | Netral | 11 | 40.7 | 40.7 | 59.3 |
| | Setuju | 11 | 40.7 | 40.7 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |

py10

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| | Tidak Setuju | 3 | 11.1 | 11.1 | 33.3 |
| | Netral | 5 | 18.5 | 18.5 | 51.9 |
| | Setuju | 13 | 48.1 | 48.1 | 100.0 |
| | Total | 27 | 100.0 | 100.0 | |



LAMPIRAN IV

Analisis Regresi

وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ لَكُمْ مِنْ آلِهَتِكُمْ

Regression

Descriptive Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|-----|--------|----------------|----|
| Y | 32.78 | 6.339 | 27 |
| X | 13.93 | 2.448 | 27 |
| Z1 | 24.41 | 4.593 | 27 |
| Z2 | 16.81 | 2.185 | 27 |
| XZ1 | 345.26 | 97.653 | 27 |
| XZ2 | 235.11 | 52.708 | 27 |

Correlations

| | | Y | X | Z1 | Z2 |
|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| Pearson Correlation | Y | 1.000 | .428 | .925 | .764 |
| | X | .428 | 1.000 | .495 | .184 |
| | Z1 | .925 | .495 | 1.000 | .759 |
| | Z2 | .764 | .184 | .759 | 1.000 |
| | XZ1 | .784 | .877 | .847 | .536 |
| | XZ2 | .722 | .875 | .760 | .635 |
| Sig. (1-tailed) | Y | . | .013 | .000 | .000 |
| | X | .013 | . | .004 | .179 |
| | Z1 | .000 | .004 | . | .000 |
| | Z2 | .000 | .179 | .000 | . |
| | XZ1 | .000 | .000 | .000 | .002 |
| | XZ2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| N | Y | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | X | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | Z1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | Z2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | XZ1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | XZ2 | 27 | 27 | 27 | 27 |

Correlations

| | | XZ1 | XZ2 |
|---------------------|-----|-------|-------|
| Pearson Correlation | Y | .784 | .722 |
| | X | .877 | .875 |
| | Z1 | .847 | .760 |
| | Z2 | .536 | .635 |
| | XZ1 | 1.000 | .953 |
| | XZ2 | .953 | 1.000 |
| Sig. (1-tailed) | Y | .000 | .000 |
| | X | .000 | .000 |
| | Z1 | .000 | .000 |
| | Z2 | .002 | .000 |
| | XZ1 | | .000 |
| | XZ2 | .000 | |
| N | Y | 27 | 27 |
| | X | 27 | 27 |
| | Z1 | 27 | 27 |
| | Z2 | 27 | 27 |
| | XZ1 | 27 | 27 |
| | XZ2 | 27 | 27 |

Variables Entered/Removed^b

| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|-------|----------------------------------|-------------------|--------|
| 1 | XZ2, Z2, Z1, X, XZ1 ^a | | Enter |

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .976 ^a | .952 | .940 | 1.550 |

Model Summary^b

| Model | Change Statistics | | |
|-------|-------------------|----------|-----|
| | R Square Change | F Change | df1 |
| 1 | .952 | 82.777 | 5 |

Model Summary^b

| Model | Change Statistics | | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|---------------|---------------|
| | df2 | Sig. F Change | |
| 1 | 21 | .000 | 1.952 |

a. Predictors: (Constant), XZ2, Z2, Z1, X, XZ1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 994.221 | 5 | 198.844 | 82.777 | .000 ^a |
| | Residual | 50.446 | 21 | 2.402 | | |
| | Total | 1044.667 | 26 | | | |

a. Predictors: (Constant), XZ2, Z2, Z1, X, XZ1

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | |
| 1 | (Constant) | 127.655 | 23.897 | | 5.342 |
| | X | 11.014 | 2.019 | 4.254 | 5.454 |
| | Z1 | .619 | .651 | .448 | .950 |
| | Z2 | 4.767 | 1.703 | 1.643 | 2.800 |
| | XZ1 | .158 | .057 | 2.437 | 2.774 |
| | XZ2 | .422 | .145 | 3.506 | 2.907 |

Coefficients^a

| Model | | Sig. | 95% Confidence Interval for B | |
|-------|------------|------|-------------------------------|-------------|
| | | | Lower Bound | Upper Bound |
| 1 | (Constant) | .000 | 77.958 | 177.352 |
| | X | .000 | -15.213 | -6.814 |
| | Z1 | .353 | -1.972 | .735 |
| | Z2 | .011 | -8.307 | -1.226 |
| | XZ1 | .011 | .040 | .277 |
| | XZ2 | .008 | .120 | .723 |



Coefficients^a

| Model | | Correlations | | | Collinearity Statistics | |
|-------|------------|--------------|---------|-------|-------------------------|-------|
| | | Zero-order | Partial | Part | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | | | | | |
| | X | .428 | -.766 | -.262 | .004 | 2.555 |
| | Z1 | .925 | -.203 | -.046 | .010 | 6.727 |
| | Z2 | .764 | -.521 | -.134 | .007 | 4.719 |
| | XZ1 | .784 | .518 | .133 | .003 | 5.610 |
| | XZ2 | .722 | .536 | .139 | .002 | 2.849 |

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

| | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | N |
|----------------------|---------|---------|-------|----------------|----|
| Predicted Value | 13.19 | 41.80 | 32.78 | 6.184 | 27 |
| Residual | -3.098 | 2.991 | .000 | 1.393 | 27 |
| Std. Predicted Value | -3.167 | 1.458 | .000 | 1.000 | 27 |
| Std. Residual | -1.999 | 1.930 | .000 | .899 | 27 |

a. Dependent Variable: Y

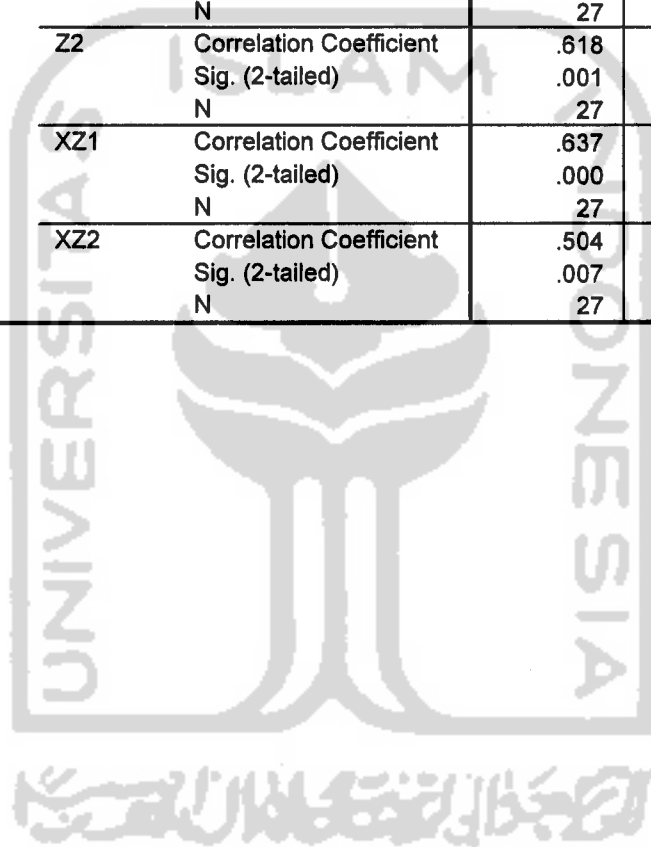
Nonparametric Correlations

Correlations

| | | | abs_res | X |
|----------------|---------|-------------------------|---------|-------|
| Spearman's rho | abs_res | Correlation Coefficient | 1.000 | -.139 |
| | | Sig. (2-tailed) | . | .488 |
| | | N | 27 | 27 |
| X | abs_res | Correlation Coefficient | -.139 | 1.000 |
| | | Sig. (2-tailed) | .488 | . |
| | | N | 27 | 27 |
| Z1 | abs_res | Correlation Coefficient | .126 | .376 |
| | | Sig. (2-tailed) | .497 | .053 |
| | | N | 27 | 27 |
| Z2 | abs_res | Correlation Coefficient | .144 | -.055 |
| | | Sig. (2-tailed) | .320 | .784 |
| | | N | 27 | 27 |
| XZ1 | abs_res | Correlation Coefficient | .063 | .909 |
| | | Sig. (2-tailed) | .756 | .000 |
| | | N | 27 | 27 |
| XZ2 | abs_res | Correlation Coefficient | -.027 | .956 |
| | | Sig. (2-tailed) | .893 | .000 |
| | | N | 27 | 27 |

Correlations

| | | | Z1 | Z2 |
|----------------|---------|-------------------------|-------|-------|
| Spearman's rho | abs_res | Correlation Coefficient | .126 | .144 |
| | | Sig. (2-tailed) | .497 | .320 |
| | | N | 27 | 27 |
| X | | Correlation Coefficient | .376 | -.055 |
| | | Sig. (2-tailed) | .053 | .784 |
| | | N | 27 | 27 |
| Z1 | | Correlation Coefficient | 1.000 | .618 |
| | | Sig. (2-tailed) | . | .001 |
| | | N | 27 | 27 |
| Z2 | | Correlation Coefficient | .618 | 1.000 |
| | | Sig. (2-tailed) | .001 | . |
| | | N | 27 | 27 |
| XZ1 | | Correlation Coefficient | .637 | .236 |
| | | Sig. (2-tailed) | .000 | .236 |
| | | N | 27 | 27 |
| XZ2 | | Correlation Coefficient | .504 | .192 |
| | | Sig. (2-tailed) | .007 | .337 |
| | | N | 27 | 27 |



Correlations

| | | | XZ1 | XZ2 |
|----------------|---------|-------------------------|-------|-------|
| Spearman's rho | abs_res | Correlation Coefficient | .063 | -.027 |
| | | Sig. (2-tailed) | .756 | .893 |
| | | N | 27 | 27 |
| X | | Correlation Coefficient | .909 | .956 |
| | | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 |
| | | N | 27 | 27 |
| Z1 | | Correlation Coefficient | .637 | .504 |
| | | Sig. (2-tailed) | .000 | .007 |
| | | N | 27 | 27 |
| Z2 | | Correlation Coefficient | .236 | .192 |
| | | Sig. (2-tailed) | .236 | .337 |
| | | N | 27 | 27 |
| XZ1 | | Correlation Coefficient | 1.000 | .960 |
| | | Sig. (2-tailed) | . | .000 |
| | | N | 27 | 27 |
| XZ2 | | Correlation Coefficient | .960 | 1.000 |
| | | Sig. (2-tailed) | .000 | . |
| | | N | 27 | 27 |



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 7 Telp. (024) 8415500 - 8311260 - 8311259 Fax. 8414415 SEMARANG 50241

SURAT KETERANGAN

No. : 070 / 586 / 2006.


Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa :

N a m a : RIMA ROSSEPTALIA
NPM : 01312097
Jurusan : Akutansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Yogyakarta

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah, tanggal 25 Januari s/d tanggal 15 Pebruari 2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**


Drs. KRIS NUGROHO
Pembina Tingkat I
NIP. 500 056 018